

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) (STUDI PROGRAM KESEHATAN DI DESA
SIALANG KAYU BATU KECAMATAN BUNUT KABUPATEN
PELALAWAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



RISA APRILIA

NPM:177110420

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Risa Aprilia
NPM : 177110420
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub bab dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Pekanbaru, 7 April 2021
Pembimbing,

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si


Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Risa Aprilia
NPM : 177110420
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program
Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan
Bunut Kabupaten Pelalawan)

Naskah Skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

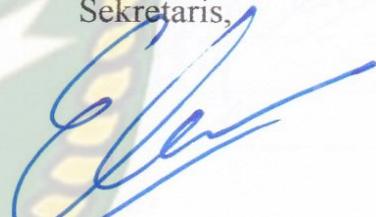
Ketua,



Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 7 April 2021

Sekretaris,



Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Anggota,



Hendry Andry S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 506/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 31 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 April 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Risa Aprilia
NPM : 177110420
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan).**
Nilai Ujian : Angka : " 82,50 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 01 April 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 506/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Perhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Ditetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : Risa Aprilia
N P M : 177110420
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan).
- Struktur Tim :**
- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Hendry Andry, S.Sos., M.Si.. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Maret 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK_080102337

Disampaikan Kepada :
Bapak Rektor UIR
Ka. Biro Keuangan UIR
Ketua Prodi
-----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Risa Aprilia
NPM : 177110420
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program
Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan
Bunut Kabupaten Pelalawan)

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 7 April 2021

A.n Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,



Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

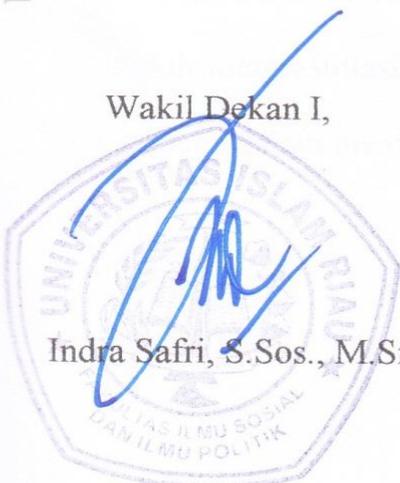


Eko Handrian, S.Sos., M.Si

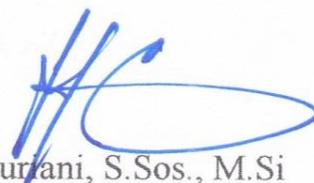
Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Lilis Surnani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kepada ALLAH SWT, karena dengan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan)”**. Penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan Fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr .Syahrul Akmal Latief.,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan Fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Lilis Suriani S.Sos.,M.Si selaku ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik dan Bapak Eko Handrian S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dan memperluas wawasan penulis dan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Ema Fitri Lubis,S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing saya yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan maupun arahan dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mencari ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam segala urusan Adminitrasi.
7. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK dan Anggota Tim Penggerak PKK yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi kepada peneliti dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
8. Kepada Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat, motivasi untuk menggapai masa depan dan selalu senantiasa mendoakan demi terselesaikannya penyusunana Skripsi ini.
9. Kepada Adik-adikku tercinta yang menjadi support system hingga selalu membuat tersenyum dan sebagai patner yang diandalkan penulis dikala hati gunda demi terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.
10. Untuk girl's Bombayah yang menjadi partner tempat bertanya hingga bertukar pikiran dan terimakasih untuk kebersamaannya dalam membantu penulis menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini.

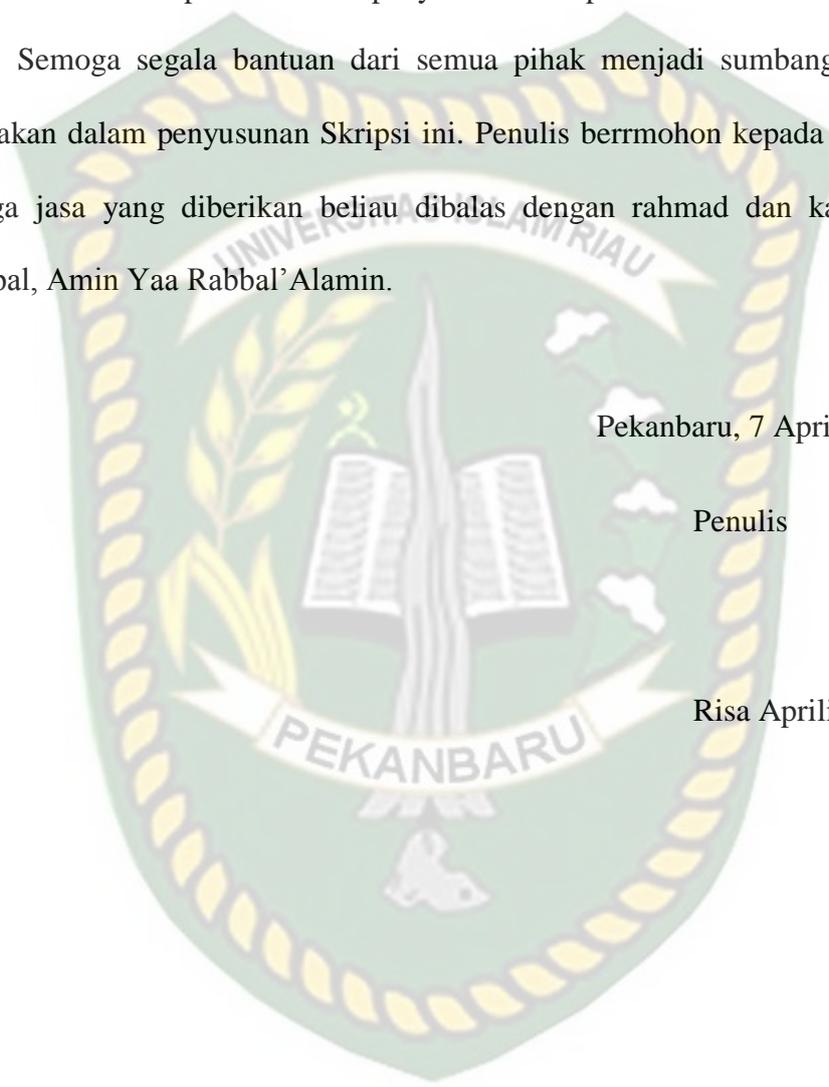
11. Teman Seperjuangan Angkatan 2017 di jurusan Administrasi maupun jurusan lainnya dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu serta bertukar pikiran bersama penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga segala bantuan dari semua pihak menjadi sumbangan yang ta terlupakan dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis berrmohon kepada Allah SWT semoga jasa yang diberikan beliau dibalas dengan rahmad dan karunia yang setimpal, Amin Yaa Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 7 April 2021

Penulis

Risa Aprilia



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	15
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Administrasi	15
2. Konsep Organisasi.....	17
3. Konsep Manajemen.....	20
4. Konsep Kebijakan publik	21
5. Konsep Implementasi Kebijakan.....	23
6. Konsep PKK	29
7. Konsep Program PKK.....	30
B. Kerangka Pikir.....	35
C. Konsep Operasional	36
D. Operasionalisasi Variabel.....	38
E. Teknik Pengukuran	39

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	43
D. Teknik Penarikan Sampel.....	43
E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	47
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan.....	47
2. Letak Dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan.....	49
3. Letak Wilayah dan Geografis Kecamatan Bunut.....	50
4. Letak Wilayah dan Geografis Desa Sialang Kayu Batu	51
B. Keadaan Penduduk.....	52
1. Tingkat Pendapatan dan Mata Pencapaian	52
2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	53
3. Jumlah Penduduk Menurut Agama	54
4. Kesehatan	56
5. Bidang kelembagaan	56
C. Visi Dan Misi Tim Penggerak PKK	57
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Identitas Responden	63
1. Tingkat pendidikan.....	63
2. Tingkat Umur	65
3. Jenis Kelamin	67
4. Mata Pencapaian	68
B. Hasil Penelitian Tentang Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan).....	70
1. Komunikasi	70
2. Sumber Daya.....	78
3. Disposisi	82
4. Struktur Birokrasi.....	86
C. Faktor hambatan dalam Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan).....	93
BAB VI : PENUTUP	95
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Jumlah Penduduk Desa Sialang Kayu Batu	2
I.2	Jumlah Penduduk Desa berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	3
I.3	Program Kerja (POKJA) PKK di Desa Sialang Kayu Batu.....	9
II.2	Operasional Variabel Tentang Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	38
III.1	Populasi dan Sampel	43
IV.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.....	50
IV.2	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk 2019.....	51
IV.3	Jumlah Penduduk Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	53
IV.4	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sialang Kayu Batu.....	53
IV.5	Jumlah Penduduk Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Menurut Tingkat Pendidikan	55
IV.6	Jumlah Masyarakat Desa Sialang Kayu Batu Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut.....	56
IV.7	Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Sialang Kayu Batu	56
IV.8	Sarana Kesehatan Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	57
IV.9	Jumlah Bidang Kelembagaan Di Desa Sialang Kayu Batu.....	58
IV.10	Daftar Kepengurusan PKK di Desa Sialang Kayu Batu Periode 2017- 2022.....	62
V.1	Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Dari Unsur PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	64

V.2	Tingkat Pendidikan Reponden Dari Unsur Masyarakat Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	65
V.3	Tingkat Umur Pada Responden Penelitian Dari Unsur PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	66
V.4	Tingkat umur Reponden Dari Unsur Masyarakat Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	66
V.5	Jenis Kelamin Pada Responden Penelitian Dari Unsur anggota PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	67
V.6 :	Jenis Kelamin Reponden Dari Unsur Masyarakat Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	68
V.7	Mata Pencaharian Responden Penelitian Dari Unsur PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	69
V.8	Mata Pencaharian Responden Penelitian Dari Unsur Masyarakat Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	69
V.9	Tanggapan Responden penelitian dari unsur (anggota PKK) Desa mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari hal Komunikasi	71
V.10	Tanggapan Responden penelitian dari unsur masyarakat Desa mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari hal Komunikasi	73
V.11	Tanggapan Responden penelitian dari unsur (anggota PKK) Desa mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan) dilihat dari hal Sumber Daya.....	78
V.12	Tanggapan Responden penelitian dari unsur masyarakat Desa mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari hal Sumber Daya.....	79

V.13	Tanggapan Responden Penelitian Dari Unsur (Anggota PKK) Desa mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari hal Disposisi	82
V.14	Tanggapan Responden Penelitian Dari Unsur (Masyarakat) Desa Mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari hal Disposisi	83
V.15	Tanggapan Responden Penelitian Dari Unsur (Anggota PKK) Desa Mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Dilihat Dari Hal Struktur Birokrasi	86
V.16	Tanggapan Responden Penelitian Dari Unsur (Masyarakat) Desa mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari hal Struktur Birokrasi	87
V.17	Rekapitulasi Tanggapan Keseluruhan Responden Penelitian mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	91
V.19	Rekapitulasi Tanggapan Keseluruhan Responden Penelitian mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	92

DAFTAR GAMBAR

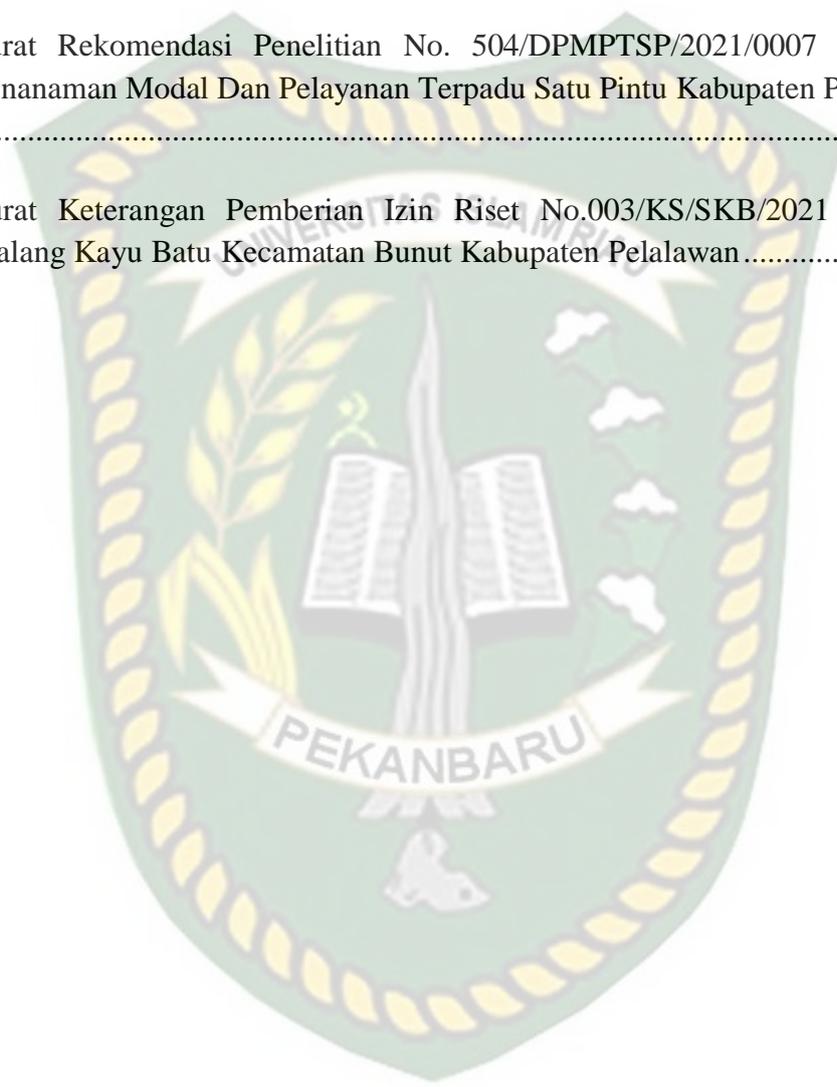
Gambar		Halaman
Gambar I.1	Bagan Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	6
Gambar II.1	Model Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar kuisisioner penelitian masyarakat Desa Sialang Kayu Batu tentang implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) (studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan).....	101
2. Daftar kuisisioner penelitian untuk anggota PKK Desa Sialang Kayu Batu tentang implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	101
3. Daftar pedoman wawancara penelitian untuk ketua Tim Penggerak PKK tentang implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	108
4. Daftar pedoman wawancara penelitian untuk ketua Pokja IV PKK tentang implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	111
5. Rekapitulasi Daftar telly data penelitian untuk masyarakat tentang implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	112
6. Rekapitulasi daftar telly data penelitian untuk anggota PKK tentang implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	116
7. Dokumentasi kegiatan hasil observasi penelitian tentang implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	119
8. SK Dekan Fisipol UIR No.603/UIR-Fs/Kpts/2020 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi An. Risa Aprilia.....	120

9. Surat Rekomendasi No.503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37615 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi an. Risa Aprilia 121
10. Surat Rekomendasi Penelitian No. 504/DPMPTSP/2021/0007 dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan 122
11. Surat Keterangan Pemberian Izin Riset No.003/KS/SKB/2021 dari Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan 123



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risa Aprilia
NPM : 177110420
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan)

Atas naskah yang saya daftarkan pada Ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan pesyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 diatas maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian yang saya telah ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak maupun juga.

Pekanbaru, 9 Maret 2021

Penulis,



Risa Aprilia

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA(PKK) (STUDI PROGRAM
KESEHATAN DI DESA SIALANG KAYU BATU KECAMATAN BUNUT
KABUPATEN PELALAWAN)**

Risa Aprilia

ABSTRAK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah lembaga kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Dalam rangka mewujudkan PKK sesuai dengan fungsi dan peranan telah ditetapkan dalam 10 program pokok yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan fokus hanya pada satu program dari 10 program pokok PKK yaitu Program Kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga studi pada program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dapat dikategorikan Cukup Terimplementasi. Adapun hambatan dalam implementasi program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan) yaitu: Faktor kemampuan dalam bidang administrasi, kurang dukungan dari Kepala Desa, faktor pola pikir masyarakat tentang pemanfaatan teknologi serta sumber anggaran dana yang terbatas.

Kata kunci : Implementasi, Program Kesehatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

IMPLEMENTATION OF FAMILY EMPOWERMENT AND WELFARE PROGRAM (PKK) (HEALTH PROGRAM STUDY IN THE VILLAGE SIALANG KAYU BATU DISTRICT BUNUT PELALAWAN)

Risa Aprilia

Abstract

Family Empowerment and Welfare (PKK) is a community institution that empowers women to participate in the development of Indonesia. In order to realize the PKK in accordance with the functions and roles have been established in 10 main programs that are steamaya fulfillment of basic needs for the realization of empowerment and welfare of families, the purpose of this study is to kNow and analyze the implementation of the Family Empowerment and Welfare program (PKK) (health program study in The Village Sialang Kayu Batu District Bunut Pelalawan). This study uses a descriptive quantitative approach, with a focus on only one program of the 10 main pkk programs, namely the Health Program. Based on the results of the research showed that the implementation of the policy of family welfare empowerment program study on health programs in the village of Sialang Kayu Batu District Bunut Pelalawan with indicators of communication, resources, disposition, bureaucratic structure can be categorized terimplementation. The obstacles in the implementation of the Family Empowerment and Welfare program (PKK) (health program study in Sialang Kayu Batu Village, Bunut District, Pelalawan Regency) are: Capability factors in the field of administration, lack of support from the Village Head, community mindset factors on the utilization of techNology and limited sources of budget.

Keywords : *Implementation, Health Program Empowerment and Family Welfare (PKK)*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dari Desa dan masyarakat Desa itu sendiri. Secara realita lembaga kemasyarakatan tersebut Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan lain-lain.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Sialang Kayu Batu dengan luas 30Km/seginya merupakan sebuah wadah pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam membantu pembangunan Negara RI. Melalui Keputusan Kepala Desa serta terdapat panduan menjalankan dan dapat memberdayakan masyarakat melalui program-program. Menurut catatan Desa Sialang Kayu Batu, penduduk yang bertempat tinggal di Desa Sialang Kayu

Batu berjumlah 1478 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Sialang Kayu Batu dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Sialang Kayu Batu

No	Jenis kelamin	Jumlah (jiwa)
1.	Laki-laki	765 Jiwa
2.	Perempuan	713 Jiwa
Jumlah		1.478 Jiwa

Sumber : Kantor Kepala Desa 2020

Selanjutnya jumlah penduduk di suatu wilayah juga memberikan ruang untuk berkreasi dan berinovasi dalam pemberian peran masyarakat serta manfaat yang didapat oleh masyarakat itu sendiri. Disamping itu Desa juga memperhatikan aspek penting dalam suatu program dalam pemberdayaan masyarakat yang disusun sendiri oleh masyarakat, dengan menjawab kebutuhan dasar masyarakat, serta mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya. Di bangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan dengan tidak menciptakan ketergantungan berbagai pihak terkait terlibat serta berkelanjutan.

Salah satu Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Sialang Kayu Batu adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disingkat PKK sebagai sebuah gerakan lembaga kemasyarakatan Desa yang mampu mengerakan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan Desa. Gerakan dan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ini mengutamakan wanita khususnya ibu rumah tangga yang berperan serta ikut berpartisipasi dan memiliki peran penting sebagai tonggak kesejahteraan keluarga

yang mengurus keluarga baik dari beberapa unsur kehidupan baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Desa berdasarkan Tingkat Pendidikan Sialang Kayu Batu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Buta Huruf	178 Jiwa
2.	Tidak tamat SD	273 Jiwa
3.	Tamat SD	473 Jiwa
4.	Sekolah Menengah Pertama	187 Jiwa
Jumlah		1.111 Jiwa

Sumber : Kantor Kepala Desa 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sialang Kayu Batu setengah masyarakatnya berpendidikan rendah dibawah kewajiban rata-rata pendidikan oleh Negara yaitu bersekolah minimal 12 Tahun. Tujuan diadakannya pemberdayaan program PKK dengan menghadapi persoalan kependudukan terkait dengan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Pemberdayaan keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri dengan menjalankan 10 program pokok yang diharapkan mampu membangun keluarga sejahtera dari unit terkecil wadah organisasi untuk melaksanakan pembangunan. Karena apabila masing-masing keluarga sudah dapat mewujudkan tata kehidupan dan memiliki rasa pengertian , keluarga yang harmonis dalam kondisi keluarga yang sejahtera sehingga Indonesia akan menjadi Negara yang aman,damai,tentram dan sejahtera.

Kegiatan rutin Tim Penggerak PKK terdiri dari kelompok PKK dari masing-masing dusun, RT,RW dan Dasawisma yang dilakukan secara tersusun dan berkelompok. Setiap dusunnya memiliki kelompok Dasawisma yang merupakan sebuah kelompok masyarakat yang tergabung dalam PKK terdiri dari beberapa

kepala keluarga mulai dari 10-20 KK (Kepala Keluarga), Dasawisma sendiri merupakan unit terkecil PKK, ketua kelompok dasawisma dipilih dari dan oleh anggota kelompok.

Adapun sasaran yang ingin di capai oleh Lembaga Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Sialang Kayu Batu adalah pengembangan masyarakat Indonesia dengan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan, baik lahir maupun batin melalui bidang-bidang;

- a) Pengembangan lahir adalah pengembangan fisik yang meliputi pangan sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.
- b) Pengembangan batin adalah pengembangan dari segi mental yang meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga Negara yang dinamis serta bermanfaat berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Adapun Visi PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut;

“Terwujudnya Keluarga Yang Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkhlak Mulia, Berbudi Luhur, Sehat Sejahtera, Maju, Mandiri, Berkesetaraan Hukum, Dan Kesadaran Lingkungan”.

Misi PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut:

Memberdayakan Masyarakat Dan Menciptakan Kondisi Untuk Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) Sehingga Mampu Membangun

Dirinya Berdasarkan Potensi, Kebutuhan Aspirasi Dan Kemenangan Yang Ada yaitu;

1. Meningkatkan mental spiritual, menghayati, dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945 menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia(HAM) demokrasi, kesetiakawanan sosial dan gotong royong.
2. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan kelurga, dalam upaya turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, dengan memanfaatkan tanah pekarangan(PTP).
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, membiasakan hidup berencana dan menabung.
5. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian mampu melaksanakan program-program yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa Sialang Kayu Batu dipimpin oleh istri kepala Desa yang membantu dalam pemberdayaan masyarakat Desa. Desa Sialang Kayu Batu ini memiliki anggota PKK yang diketuai oleh ibu Yunarlis sebagai istri kepala Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 9 dapat diketahui struktur dibentuk di setiap jenjang pemerintahan, mulai dari Pusat hingga Desa yaitu:

- (1) Dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Desa dibentuk TP PKK Desa

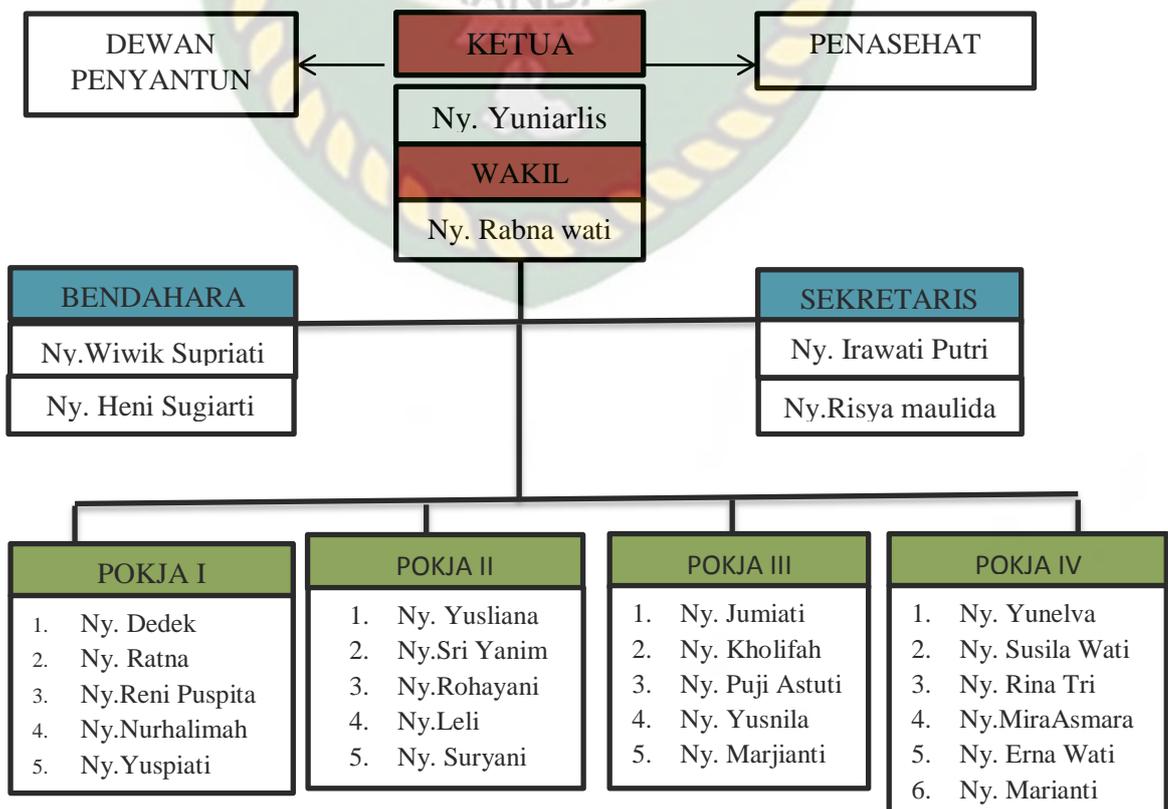
(2) Struktur keanggotaan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Ketua; Istri kepala Desa
- b. Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota; laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan partai politik

(3) Susunan keanggotaan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Kemudian PKK di Desa Sialang Kayu Batu memiliki struktur lembaga sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa No.141/Kpts-PEMDES/SKB/1/2018/08, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.I : Bagan Struktur Lembaga Tim Penggerak PKK di Desa Sialang Kayu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan



Sumber: Kantor Desa Sialang Kayu Batu, 2020

Menurut (Rauf & Munaf 2015;318) lembaga PKK Desa merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat khususnya ibu-ibu masyarakat Desa yang juga diberikan peranan untuk membantu tugas pemerintah khususnya Kepala Desa wajib dilakukan pembinaan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Camat, Lurah/Kepala Desa dan unsur pembinaan lainnya seperti Perguruan Tinggi, Dinas Terkait dan Lembaga-Lembaga Pembinaan lainnya.

Tim Pembina pemberdayaan kesejahteraan keluarga adalah kementerian/lembaga pemerintah/dinas/instansi yang mempunyai program dibidang kesejahteraan keluarga yang dalam upaya pendukung pelaksanaan program-program gerakan PKK pada setiap jenjang TP-PKK dengan susunan keanggotaan:

- a. Dipusat diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan anggota adalah pemimpin instansi/lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri selaku ketua Pembina TP-PKK Pusat.
- b. Diprovinsi, Kabupaten/kota dan kecamatan. Diketuai oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat dengan anggota para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. Bupati/Walikota, Camat selaku ketua Pembina TP-PKK.
- c. Di Desa/ Kelurahan diketua oleh Kepala Desa/ Lurah dengan anggota para tokoh/pemuka masyarakat, perangkat Desa dan lembaga

kemasyarakatan dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa/lurah selaku ketua pembina TP-PKK.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Pasal 11. Pada unsur sumber daya manusia yaitu Tim Penggerak PKK di Desa menjalankan 10 Program program pokok PKK yang hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Ketrampilan
7. Kesehatan
8. pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Yaitu “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pelaksanaan program ini sangat perlu diperhatikan untuk membangun dan membantu kehidupan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di masyarakat”..

Adapun pelaksanaan program PKK yang telah dilakukan dalam menggerakkan masyarakat khususnya kaum perempuan untuk dapat memiliki peran aktif sebagai pengurus rumah tangga dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. sehingga pelaksana kegiatan program kerja PKK terbagi dalam kelompok kerja atau pokja ini terbagi ke dalam empat kelompok. Masing-masing pokja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelenggaraan 10 program pokok PKK dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Program Kerja (POKJA) PKK di Desa Sialang Kayu Batu

No	Program Kerja (POKJA)	Uraian Program Pokok PKK
1.	Pokja I	- Program Penghayatan dan pengamalan pancasila - Program Gotong Royong
2.	Pokja II	- Program Pendidikan dan keterampilan - Program Pengembangan kehidupan berkoperasi
3.	Pokja III	- Program Pangan - Program Sandang - Program Perumahan dan tatalaksana rumah tangga
4.	Pokja IV	- Program Kesehatan - Program Kelestarian lingkungan hidup - Program Perencanaan sehat

Sumber : Kantor Kepala Desa 2020

Pada tabel I.3 adapun peneliti memfokuskan penelitian pada satu program saja yaitu pada **Program Kesehatan**. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Manusia harus belajar bagaimana cara menjaga, memelihara kesehatan diri, keluarga serta lingkungan tempat tinggalnya. Pelaksanaan pada Program Kesehatan dimaksudkan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Selanjutnya PKK Desa Sialang Kayu Batu pada program Kesehatan melaksanakan salah satunya adalah kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

untuk golongan balita dan ibu hamil dengan pemberian vitamin, imunisasi serta pelayanan kesehatan sosialisasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatannya rutin dilakukan setiap bulannya merupakan upaya PKK dalam melindungi kesehatan bagi masyarakat dengan melibatkan RT dan RW di bawah bimbingan puskesmas yang berada di lingkungan wilayah tugasnya.

Kemudian pada pelaksanaan kegiatan ini, Pokja IV yang berperan penting dalam kegiatan Posyandu ini, adapun standar pelaksanaannya berasal dari buku pedoman umum PKK sebagai standar pelaksanaan dari seluruh kegiatan di PKK dan disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Posyandu, masyarakat bukan saja mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, juga mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan kesehatan yang juga merupakan keprihatinan pemerintah terhadap tingginya angka kematian ibu dan anak (KIA).

Adapun beberapa Tugas Pokja IV :

- 1) Meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan millennium.
- 2) Meningkatkan budaya perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 3) Mengembangkan dan membina pelaksanaan kegiatan POSYANDU.
- 4) Memonitor pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP).
- 5) Melaksanakan pencatatan ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran, kematian bayi dan balita.
- 6) Tanam dan pelihara pohon dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan.
- 7) Mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera dengan melaksanakan program KB agar tercapai generasi yang sehat, cerdas dan tangguh.

- 8) Meningkatkan pengetahuan tentang budaya hidup hemat, membudayakan kebiasaan menabung dan melaksanakan tatalaksana keuangan dalam rangka mendukung perencanaan sehat.

Adapun dalam kegiatannya PKK Desa Sialang Kayu Batu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK.
2. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK. Untuk efisiensi kerja dalam pengurusan PKK maka telah diadakan pembagian tugas, wewenang pengurus, sesuai porsi dan bidang tugasnya :
 - 1) Ketua TP PKK Bertanggung jawab atas jalannya kegiatan baik di dalam maupun di luar, memimpin dan mengkoordinasikan dan membina anggota pengurus.
 - 2) Wakil Ketua PKK Mewakili Desa atau menunjuk seorang pengurus dalam hubungan organisasi dan dalam keadaan mendesak, bersama-sama pengurus menentukan kebijaksanaan
 - 3) Sekretaris Bertanggung jawab atas mekanisme administrasi kesekretariatan dan mencatat, merekap kegiatan pengurus
 - 4) Bendahara Mengelola kas umum, block jawab atas mekanisme dan sirkulasi keuangan
 - 5) Anggota Pengurus TP-PKK yang bukan merupakan perwakilan dari suatu organisasi, lembaga, dan partai politik lainnya.

Kemudian Sumber Daya pada unsur Money atau keuangan dari lembaga PKK di Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyatakan bahwa keuangan Lembaga PKK di Desa diperoleh dari beberapa sumber yakni: swadaya masyarakat termasuk didalamnya sumbangan anggota lembaga PKK, bantuan dari anggaran Dana Desa, bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Kemudain beranjak dari uraian latar belakang tersebut, menurut pra-survei sementara penulis menemukan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi antar ketua ke anggota Tim Penggerak PKK dan sosialisasi anggota PKK dengan masyarakat sehingga antusiasme masyarakat masih rendah terhadap pentingnya program PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Sialang Kayu Batu.
2. Kurangnya kejelasan akan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan dalam program kesehatan sehingga pelaksanaan tugas dari anggota PKK sering tumpang tindih.
3. Anggaran dana yang tidak sebanding dengan kebutuhan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta masih perlu dilengkapi fasilitas penunjang yang memadai pada program kesehatan.
4. Terlihat partisipasi masyarakat kurang maksimal dilihat dari manfaat setiap kegiatan tidak semua dirasakan oleh masyarakat itu sendiri sebagai penerima informasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis dapat merumuskan masalah pokok penelitian adalah:

1. Bagaimana Implementasikan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan)
2. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kesehatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

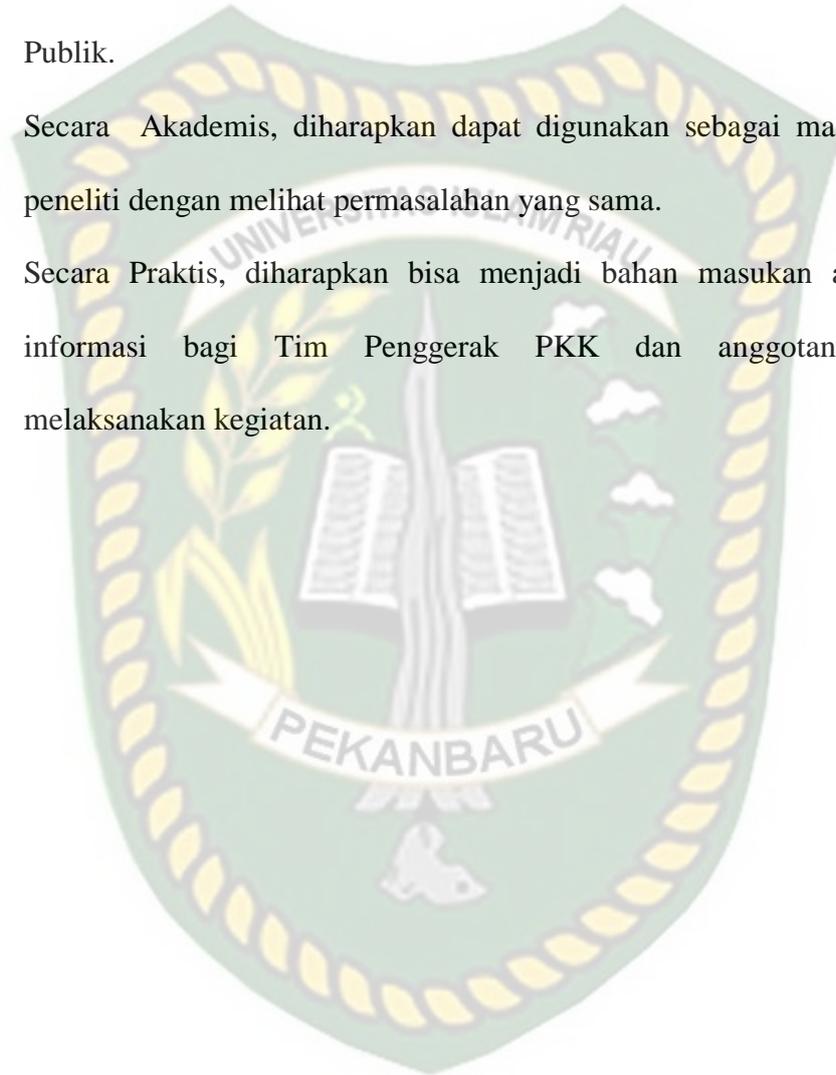
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengimplementasikan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan)
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi program Kesehatan) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam kembang ilmu administrasi terutama Administrasi Publik.
- b. Secara Akademis, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti dengan melihat permasalahan yang sama.
- c. Secara Praktis, diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi bagi Tim Penggerak PKK dan anggotanya dalam melaksanakan kegiatan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGK PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi di definisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Siagian;2003;2)

Ralp Cuuier Davis (dalam Sufian.H, 2005;8) administrasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja kearah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Atmosudirjo (Zulkifili dan Moris, 2014;10), merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep administrasi yaitu:

- a. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusa atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.
- b. Organisasi modern sebagai bahan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statula yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (purpose) dan tujuan-tujuannya (goals), usahanya, sumber pendanaannya (financial resources), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- c. Setiap organisasi modern dipakai (yang bertugas dan bertanggungjawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh Administrator.

- d. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
- e. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi.

Dapat disimpulkan dari teori yang telah dijelaskan bahwa administrasi merupakan seluruh proses kegiatan bekerjasama didalam suatu kelompok demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Chandler & Plano (dalam Pasolong, 2013;55) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan di koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan kebijakan publik.

Menurut Jhon M.Pfiffner dan Robert V.Presthus (dalam Pasolong, 2013;56) mendefenisikan administrasi publik adalah (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik; (2) koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah; (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Sedangkan menurut Nicolas Henry (dalam Pasolong, 2013;56) mendefenisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar lebih baik.

2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah: setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (dalam Siagian, 2003;6)

James D. Mooney mengatakan organisasi yaitu setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Chester I. Barnard adalah suatu sistem kegiatan yang di arahkan pada tujuan yang hendak dicapai fungsi utama manajemen yaitu perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan (dalam zulkifli & Nurmasari, 2015;41)

Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan. Jadi organisasi dapat di defenisikan sebagai berikut:

1. Organisasi dalam arti badan yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi dalam arti bagan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas (Zulkifli, 2009;71)

Menurut siagian (dalam Yussa & Andry, 2015;14) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut bawahan.

M.Manullang (dalam Hasibuan, 2016;121) organisasi dalam arti dinamis (pengorganisasian) adalah suatu proses penerapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab .

Makmur (2008;108) organisasi terdiri dari dua bagian yang besar, pertama organisasi sebagai wadah atau tempat. Kedua organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan, sedang atau yang dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi.

Organisasi publik dikembangkan dari organisasi, oleh karena itu dengan memahami organisasi publik dapat ditinjau dari pandangan teori organisasi. menurut fahmi (2013;1) organisasi merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak dan tidak terkecuali keputusan bagi pemiliknya.

Organisasi menurut Stephen P. Robbins dalam fahmi (2013) organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan

sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Struktur organisasi salah satu variabel yang memiliki unsur yang akan diuraikan dalam bagian tersendiri. Proses dalam organisasi adalah aktivitas yang memadai adanya kegiatan dalam organisasi tersebut. Proses organisasi menurut Robbins (1994:789) meliputi:

- a. Hubungan antar peranan, yaitu hubungan formal dan jalur organisasi antara para anggota sesuai dengan peranan masing-masing.
- b. Pengendalian, yaitu penetapan untuk menilai kemajuan rencana membandingkan hasil yang aktual yang diharapkan.
- c. Koordinasi yaitu proses dimana pemimpin mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok diantara para bawahannya serta kepastian dan kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. Pembinaan anggota yaitu usaha berencana meliputi keseluruhan organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi serta pendekatan berencana dalam proses organisasi.
- e. Sosialisasi, yaitu proses penerapan nilai dan tata kerja organisasi kepada anggota baru agar mereka berperilaku seperti yang dikehendaki oleh organisasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah serta juga proses aktivitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan berperan membangun dan menjaga hubungan dengan lingkungan yang dapat dipengaruhi baik itu lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah suatu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan koorporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik dan dilandasi dengan pengaturan hukum yang berlaku.

3. Konsep Manajemen

Manajemen dapat di defenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi (dalam siagian, 2003;5)

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (dalam Hasibuan, 2016;2)

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut:

1. Enylopedia of the social science, yaitu suatu proses dimana pelaksana suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.

2. Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
3. Georgy R.Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dengan melalui kegiatan orang lain (dalam Zulkifli, 2015;5).

Menurut Stoner berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (dalam Zulkifli, 2005;28)

Jadi dapat disimpulkan, manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dengan melihat aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip manajemen serta proses mengelola berupa tindakan-tindakan yang dilakukan mulai dari:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengawasan
4. Pengarahan
5. Pengendalian

4. Konsep Kebijakan

Terdapat banyak definisi mengenai kebijakan politik dalam literatur-literatur politik. Namun masing-masing definisi memberikan beberapa penekanan yang berbeda-beda dikarenakan masing-masing para ahli memiliki latar belakang yang berbeda-beda, walaupun pendekatan dan model yang masing-masing digunakan

para ahli dapat juga memberikan penjelasan bagaimana kebijakan publik dapat didefenisikan.

Menurut Eulau & Prewit (1973;465) yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar kebijakan publik (2020; 15) yang menyatakan kebijakan publik adalah ‘keputusan tetap’ yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Menurut Dye 1981 (dalam Runilawaty Kasmad, 2013;86) Lengkapnya proses kebijakan publik terdiri dari langkah-langkah yaitu: 1) *problem identification* (identifikasi masalah kebijakan), 2) *formulation* (Tahapan formulasi kebijakan), 3) *legitimation*(Legitimasi kebijakan), 4)Implementation (implementasi kebijakan), dan 5)Evaluation (evaluasi kebijakan).

Eystone (dalam Wahab, 2014;13) yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah “*the relationship of government until to its environment*” (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Selanjutnya menurut Wilson (dalam wahab, 2014;13) yang merumuskan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)).

Selanjutnya dikemukakan oleh Thomas R.Dye (1978; 1987;1) (dalam Wahab, 2014;14) yang menyatakan kebijakan publik adalah “*Whatever*

government choose to do or Not to do” (pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).

Menurut W.I.Jenkins (1978:15) (dalam Wahab, 2014;15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Menurut Willy N Dunn (dalam syafie, 2010;106) mengatakan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan dan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Dapat disimpulkan dari pengertian kebijakan publik menurut para ahli diatas adalah serangkaian tidakan/kegiatan dan keputusan pemerintah yang dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan yang terjadi.

5. Implementasi Kebijakan

Implementasi program PKK di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut berguna bagi penelitian ini dengan beberapa konsep menurut para ahli:

Menurut pendapat Ripley (dalam Edward & Diyah 2015;68) implementasi dapat dilihat dari dua perspektif sebagaimana dijelaskan: *“implementation studies have two major for: “compliance” and “what’s happening?”*. Perspektif pertama

(compliance perspective) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program). Perspektif kedua untuk memahami implementasi secara lebih luas. Pendapat Ripley “*what is achieving? And why or what’s happening? And why?*” bahwa ukuran keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari segi kepatuhan para implementer dalam mengikuti SOP namun juga diukur dari keberhasilan dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan yang wujud nyatanya berupa dampak kebijakan.

Proses kebijakan akan memungkinkan terjadinya perbedaan antara harapan pelaku pembuat kebijakan dengan hasil/kinerja dari pelaksanaan kebijakan kecil besarnya perbedaan tersebut sedikitnya kan tergantung pada apa yang oleh Walter William (1971;1975) *implementation capacity* dari organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (Policy decision) sedemikian rupa, sehingga ada jaminan sedemikian rupa, sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai (dalam Wahab, 2014;128)

Menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (dalam wahab, 2014;135-136).

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan perorangan atau sekelompok orang, baik dalam lingkup pemerintah maupun swasta untuk mendistribusikan keluaran dari kebijakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya kepada kelompok sasaran dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha perubahan besar dan kecil yang dihasilkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (dalam Runilawaty Kasmad, 2013;38).

Implementasi merupakan aktivitas setelah adanya pengarahannya dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2014;135) mendefinisikan "proses Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan dalam priode waktu tertentu maupun dalam melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan kecil maupun besar yang diterapkan dalam program.

Menurut Leo Agustino (2020; 154-158) Dalam pendekatan teorema oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu;

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan).

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu;

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b. Informasi; informasi mempunyai dua bentuk (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang; efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, namun disisi lain efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan

untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bisa. Hal-hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III adalah:

- a. Efek disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan pejabat tinggi.
 - b. Melakukan pengaturan birokrasi; implementasi kebijakan merujuk pada penunjukkan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, keabilitas dan kompetensinya.
 - c. Intensif; dengan cara menambahkan keuntungan dan biaya tertentu akan dapat menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.
4. Struktur birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik dengan:

- a. Membuat standar operating procedures (SOPs) yang lebih fleksibel. SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana yang rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan.

- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab pelbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidang masing-masing.

Dilihat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam serangkaian proses yang berupa tindakan/ kegiatan/pelaksanaan dari berbagai administrator untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan adanya aktivitas pencapaian tujuan sehingga akan mencapai adanya hasil kegiatan.

6. Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga(PKK)

Bedasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017 pasal 1 bahwa Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga yang selajutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari , oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keahlian gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Dalam buku pedoman umum PKK (2019) Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan sebuah gerakan mewakili perempuan yang telah diakui keberadaannya dan program pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mewujudkannya kesejahteraan keluarga.

7. Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

Menurut Jones (2001;292) Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa dalam setiap program dijelaskan mengenai;

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Menurut Nawawi (2007;174) program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipatif aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dapat disimpulkan program adalah unsur pertama yang harus ada untuk terciptanya suatu kegiatan. Sebuah kegiatan dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila terdapat manfaatnya ataupun memberikan pengaruh positif bagi masyarakat.

Menurut Nakamura dan Smallwood (dalam Sujianto, 2008;152) mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program:

- a. Prespektif yang menilai keberhasilan pelaksanaan program dari aspek kepatuhan aparat birokrat bawahan kepada birokrat atasannya, atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandate/kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang.
- b. Keberhasilan pelaksanaan program dari segi berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan program dan tidak adanya konflik kedua prespektif ini mendefinisikan keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi proses.
- c. Keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program.

Didalam buku pedoman umum PKK terdapat karakteristik Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) terdapat pada ;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga dalam undang-undang pasal 2 yaitu penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan dilakukan melalui Gerakan PKK

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan sesuai dengan Pedoman Umum PKK merupakan 10 Program Pokok PKK yaitu di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut:

- 1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disini menegaskan bahwa pancasila merupakan ideologi bangsa yang dianut oleh seluruh bangsa Indonesia yang pada masing-masing sila dalam pancasila memiliki makna dan tujuan yang mendasari kegiatan dari gerakan PKK.
- 2) Gotong Royong adalah bekerja bersama-sama, saling tolong menolong, bahu membahu antara sesama manusia untuk menggapai satu tujuan untuk menggapai kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia tanpa mengenal kondisi sosial masing-masing serta merupakan salah satu sikap kepedulian terhadap sesama, setiap individu saling memahami satu sama lain.
- 3) Pangan merupakan salah satu upaya untuk menggapai kesejahteraan hidup dengan memiliki sikap mandiri dan disiplin. Dalam rangka hidup sejahtera hal yang paling pokok adalah memenuhi ketersediaan pangan, bagaimanapun pangan atau makanan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia sebagai makhluk hidup. PKK disini hadir untuk membangun ketahanan pangan dengan mengajak masyarakat untuk berjuang hidup sendiri dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang berkebun untuk memanfaatkan pekarangan yang ada.
- 4) Sandang merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia bukan hanya sebagai penutup tubuh(aurat), sebagai pelindung tubuh dari panas dan

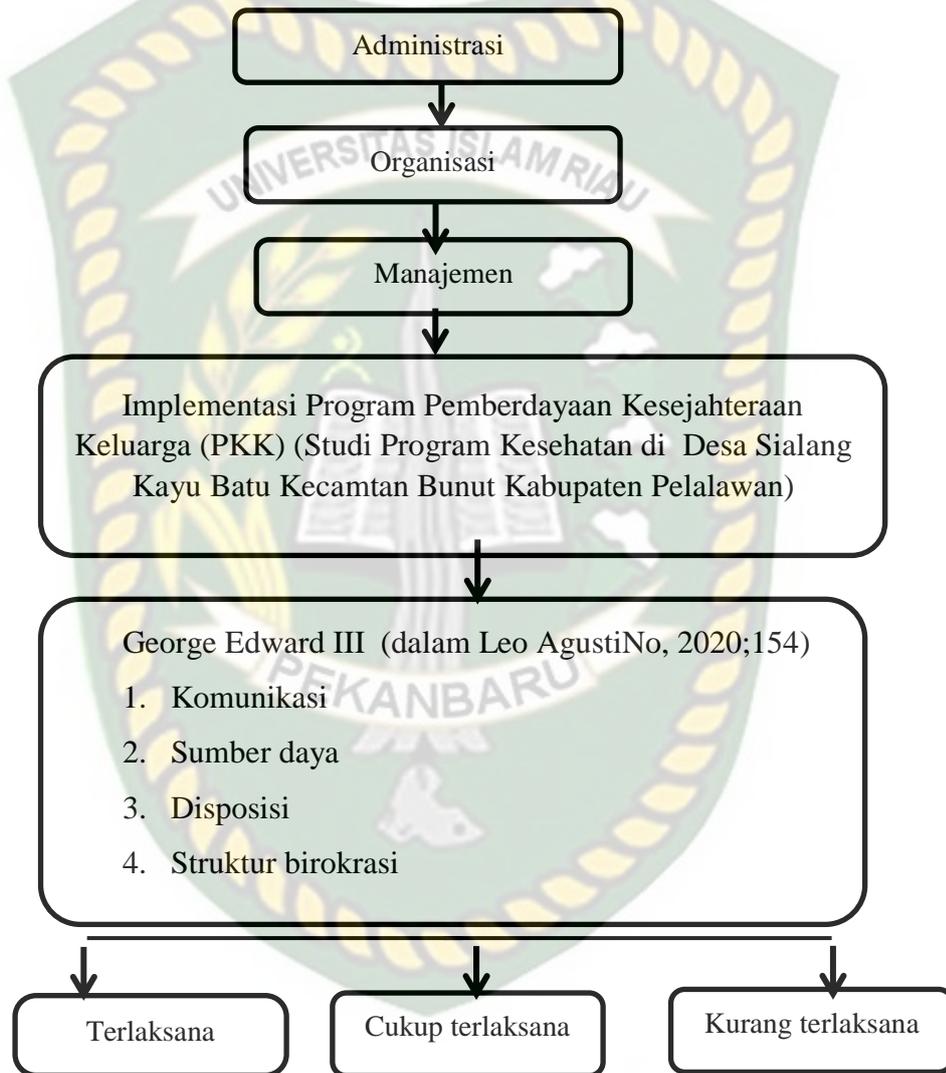
dingin tetapi juga menunjukkan identitas diri. Dalam hal ini PKK menjadikan salah satu programnya untuk mengajak masyarakat membeli produk-produk buatan dalam negeri, karya bangsa sendiri.

- 5) Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga merupakan kebutuhan papan, setiap orang yang sudah berumah tangga membutuhkan rumah untuk kelangsungan hidup rumah tangga mereka. PKK memprogramkan tata kelola rumah tangga yang baik, dan ideal dalam mewujudkan rumah tangga yang sehat, damai, rapi, nyaman dan apik. Karena suasana rumah mendukung kondisi fisik dan mental penghuninya maka dari itu rumah ditata dengan rapi, memperhatikan kebersihan dan juga penataan pekarangan rumah yang dapat dikelola menjadi apotik hidup.
- 6) Pendidikan dan Ketrampilan merupakan hal penting dalam menggapai kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dengan formal ataupun Non formal seperti penyelenggaraan latihan dan membaca dengan membangun perpustakaan Desa serta kursus-kursus keterampilan dan sebagainya.
- 7) **Kesehatan** merupakan modal penting dalam menggapai kesejahteraan sehingga upaya PKK untuk menghadirkan kesehatan bagi masyarakat seperti posyandu. Program posyandu ini juga terlihat dari keprihatinan pemerintah terhadap tingginya angka kematian ibu dan anak (KIA) tujuannya untuk mengurangi bahkan menghilangkan angka kematian tersebut juga, peran program posyandu ini juga diharapkan mampu untuk menekan angka kelahiran yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

- 8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi berangkat dari tingkat konsumtif masyarakat tidak hanya sebagai pemenuhan primer/pokok namun juga kebutuhan sekunder berupa keinginan/hasrat. Sehingga pengadaan koperasi akan banyak membantu untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan ataupun pinjaman modal usaha untuk memberdayakan masyarakat. Selain peningkatan pendapatan keluarga juga dapat saling tolong menolong, saling bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama.
- 9) Kelestarian Lingkungan Hidup menjadi faktor luar pendukung keberlangsungan hidup dan kegiatan manusia, tanaman, dan hewan. Masalah lingkungan yang sering ada seperti pencemaran baik berupa industri atau sampah, polusi udara dari kendaraan bermotor, polusi air spesies hewan mati dan sebagainya. Sehingga PKK turut andil untuk menjaga lingkungan dengan mengajak masyarakat melestarikan lingkungan dengan bebas dari sampah, dengan tidak membuang sampah sembarangan, mencegah pencemaran sumber air dengan bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal dengan mengumpulkan, memisahkan sampah dan memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang menjadi keterampilan dan juga memberantas sarang nyamuk.
- 10) Perencanaan Sehat bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia mencakup kebutuhan fisik juga kebutuhan batin dan sosial merupakan perencanaan keluarga, keseimbangan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, sehingga berbagi pekerjaan dengan seluruh anggota keluarga berdasarkan kemampuan masing-masing individu.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 :Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) (Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan).



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

C. Konsep Operasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yan digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

Maka peneliti menggambarkan mengenai konsep operasional yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai beriku:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk pesekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pecapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan dan kemananan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.
5. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah

atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

6. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah sebuah gerakan representative perempuan yang telah diakui keberadaannya dan program pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mewujudkannya kesejahteraan keluarga.
7. Komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain.
8. Sumber-sumber daya adalah salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan menurut Edward III, dalam implementasi kebijakan beberapa indicator yang mengukur sumberdaya diantaranya; *Staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.*
9. Disposisi adalah suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh.
10. Struktur birokrasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, konsep, variabel, indikator, ukuran dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka operasional variabelnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan)

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Item penilaian (4)	Skala (5)
Implementasi adalah penerapan pencapaian keberhasilan kebijakan yang berdasarkan kegiatan komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, menurut Edward III (2020;154)	Implementasi program Kesehatan PKK	1. Komunikasi	1. Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan. 2. Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup terlaksana • Kurang terlaksana
		2. Sumber Daya	1. Kecukupan staf berupa sumber daya utama. 2. Fasilitas fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup terlaksana • Kurang terlaksana
		3. Disposisi	1. Sikap dari para pelaksana program 2. Jumlah intensif pelaksana program	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup terlaksana • Kurang terlaksana
		4. Struktur Birokrasi	1. Membuat standar operating procedures (SOPs) 2. Melaksanakan tanggung jawab terhadap program.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup terlaksana • Kurang terlaksana

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

F. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini teknik pengukuran penelitian yaitu implementasi program PKK dan pengukuran terhadap indikator penelitian yaitu Komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Adapun indikator penelitian ini penulis membagi dalam tiga ukuran yaitu: terimplementasi, kurang terimplementasi, dan tidak terimplementasi. Adapun teknik pengukuran penelitian penulis sebagai berikut:

Implementasi Program PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) (studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut)

Terimplementasi : Apabila keempat indikator hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup Terimplementasi : Apabila keempat indikator hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 34%-66%.

Kurang Terimplementasi : Apabila keempat indikator hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 1%-33%.

Adapun indikator-indikator diatas dikatakan terimplementasi, kurang terimplementasi, dan tidak terimplementasi hasilnya di ukur dengan menggunakan pedoman antara lain:

1. Komunikasi

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 34%-66%.

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 1%-33%.

2. Sumber daya

Terimplementasi : Apabila hasil atnggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 34%-66%.

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 1%-33%.

3. Disposisi

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 34%-66%.

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 1%-33%.

4. Struktur birokrasi

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 34%-66%.

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan Responden pada kategori terimplementasi terhadap program PKK berada pada rentang persentase 1%-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe Deskriptif yaitu Menurut Sugiyono (2012;12) adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. Peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Kemudian dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014;14) Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berada di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut. Adapun alasannya dipilih lokasi penelitian ini dimana PKK di Sialang Kayu Batu terlihat tidak banyak melakukan kegiatan di bandingkan beberapa Desa di Kecamatan Bunut yang aktif dalam berbagai kegiatan dan program. Sehingga peneliti tertarik ingin melihat pelaksanaan kegiatan khususnya pada Program Kesehatan dari implementasi

program PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) yang ada di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau *univers* yang ciri-cirinya atau karakteristik-karakteristiknya dapat diamati untuk ditarik menjadi suatu sampel dalam penelitian (dalam Pasalong, 2013;100)

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari kuantitas populasi yang mencerminkan dari keseluruhan populasi tersebut (dalam Pasalong, 2013;101)

Tabel III.1 : Tabel jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

NO	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Ketua Tim Penggerak PKK	1	1	100%
2.	Anggota Tim Penggerak PKK	25	5	20%
3.	Ketua Pokok Kerja IV	1	1	100%
4.	Anggota Pokja IV	5	5	100%
5.	Masyarakat	1.478 jiwa	94	6%
Jumlah		1.510 jiwa	106	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel dalam implementasi program PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) di Desa Sialang Kayu Batu adalah Teknik sampling jenuh (sensus) pada Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua

Pokok kerja IV, Anggota Tim Penggerak PKK pada pokja IV, kerana seluruh populasi dijadikan sampel.

Selanjutnya Anggota Tim Penggerak PKK dan masyarakat/KK menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik penarikan sampel yang merupakan Responden penelitian dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu karena jumlahnya banyak, hal ini dilakukan pertimbangan sampel yang diambil, dianggap dapat mewakili seluruh jumlah populasi karena jumlahnya sangat besar sehingga sampel masyarakat sebagai penerima manfaat yang ditetapkan dalam penelitian ini sebanyak 94 sampel.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dan kuisisioner (angket) kepada Responden berdasarkan item penilai mengenai implementasi program PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga).

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data berupa referensi ataupun studi dokumen yang berisi seperti buku, jurnal, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, program PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan yang terkait dalam permasalahan penelitian ini untuk melengkapi dalam landasan penelitian, laporan tertulis dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuesioner

Kuisisioner adalah suatu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diisi oleh Responden itu sendiri (Pasalong, 2013;141). Dalam penelitian ini, Responden yang diberikan kuisisioner adalah anggota PKK dan masyarakat Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut. Pertanyaan yang diberikan melalui kuisisioner berkaitan langsung dengan indikator variabel penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik pengumpulan data ini dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti mengenai implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK) di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

3. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti (Pasalong, 2013;131). Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti guna mengungkap Non partisipatif yaitu dalam melaksanakan pengamatan, peneliti tidak secara terus menerus dengan selalu aktif

mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PKK dalam rangka implementasi 10 program pokok

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang penulis peroleh dari hasil arsip maupun dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, baik data yang bersumber dari foto, video maupun rekaman, surat-surat lainnya berbentuk catatan harian, laporan maupun dari buku karya ilmiah yang telah dipublikasikan.

G. Teknik Analisis Data

Data yang berasal dari jawaban wawancara dan jawaban kuesioner Responden tentang implementasi program PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga). Selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung.

Kemudian di analisis dengan metode penelitian deskriptif (penggambaran), yaitu suatu cara yang mendeskripsikan data yang terkumpul secara menyeluruh pada saat melakukan penelitian secara objektif. Dengan menganalisa dan menggambarkan terperinci berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi dilapangan kemudian mengambil kesimpulan serta menyajikan dalam bentuk penelitian berdasarkan secara metode penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/kota di provinsi riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 oktober 1999 di Jakarta dan operasional pemerintah daerah pada 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai dari alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari kerajaan pekantua, yang melepaskan diri dari kerajaan Johor Tahun 1699M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.256,7 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan mencapai 280.197 jiwa dengan kepadatan penduduk 12 jiwa/km². Kemudian di Kabupaten Pelawan terdapat 12 Kecamatan, 106 Desa dan 12 kelurahan. Desa-Desa tersebut ada yang terletak di pinggiran sungai ada juga di perkebunan dan transmigrasi. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak

pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 lintas selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur lintas timur sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No.KTPS.528/XI/2000 tanggal 9 November Tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilakukan oleh ketua pengadilan negeri bangkinang atas nama ketua MA RI tanggal 15 November Tahun 2000.

Dengan terbentuknya legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan bupati pertama dilakukan pada tanggal 5 maret 2001 melalui sidang paripurna bupati pertama dilakukan pada tanggal 5 maret 2001 melalui sidang paripurna, terpilihnya pasangan T.Amun jaafar, SH dengan ABD. Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 april 2004 diadakan pemilihan anggota DPRD Kabupatrn Pelalawan langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD kabupaten Pelalawan dengan surat keputusan No.KTPS.508/VIII/2004 tentang anggota dewan Kabupaten Pelalawan masa jabatan 2004-2009 yang diresmikan pengangkatannya.

Setahun setelah pemilihan anggota DPRD tepatnya tanggal 8 februari 2006, diadakan pemilihan bupati/wakil bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T.azmun jafar dengan rustam

effendi yang kemudian di kukuhkan dengan keputusan menteri dalam negeri No.131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan bupati Pelalawan Provinsi Riau.

2. Letak Dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir pantai timur pulau sumatera antara 1,25' lintang utara sampai 0,20' lintang selatan antara 100,42; bujur timur sampai 103,28' bujur timur dengan batas wilayah:

Sebelah utara : Kabupaten Siak (Kecamatan sungai apit dan Kecamatan siak); kabupaten telukmeranti (Kecamatan tebing tinggi timur);

Sebelah selatan : Kabupaten Indragiri hilir (Kecamatan kateman, Kecamatan mandah, dan Kecamatan gaung); Kabupaten indargiri hulu (keamatan rengat, Kecamatan pasir penyu, Kecamatan peranap, dan kecamatan kuala cenayu); Kabupaten kuantan singingi (kecamatan kuantan hilir, dan Kecamatan singingi);

Sebelah barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar kiri, Kecamatan siak hulu); kota pekanbaru (Kecamatan rumbai dan tenayan raya);

Sebelah timur : provinsi kepulauan riau.

Pelalawan kurang lebih 13.924,94Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan dengan kecamatan terluas adalah kecamtan teluk meranti yaitu 423,984Ha (30,45%) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355Ha atau (1,39%) dari luas Kabupaten Pelalawan.

Jumlah penduduk kabupaten Pelalawan Tahun 2019 adalah 483,62 ribu jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 247,994 Jiwa dan perempuan 235.628 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan dengan penduduk terbanyak di Pangkalan Kerinci yaitu 144,9 jiwa dan terendah di bandar petalangan 14,7 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 28 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 523 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah penduduk (Ribu)	Rasio Jenis Kelamin
1	Langgam	18.000	16.927	34,9	1,1
2	Pangkalan kerinci	73.883	71.032	144,9	1,0
3	Bandar sei kijang	23.510	21.980	45,5	1,1
4	Pangkalan kuras	33.457	31.913	65,4	1,1
5	Ukui	22.054	20.056	42,1	1,1
6	Pangkalan lesung	17.781	16.631	34,4	1,1
7.	Bunut	8.589	8.469	17,1	1,0
8	Pelalawan	11.171	10.220	21,4	1,1
9	Bandar petalangan	7.330	7.316	14,7	1,0
10	Kuala Kampar	9.310	8.961	18,3	1,0
11	Kerumutan	13.433	12.899	26,3	1,0
12	Teluk meranti	9.476	9.224	18,7	1,0
JUMLAH		247.994	235.628	483,6	1,1

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan, 2019

3. Letak Wilayah Dan Geografis Kecamatan Bunut

Kecamatan Bunut adalah salah satu Kecamatan induk pembentuk Kabupaten Pelalawan, yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 53 Tahun 1999. Saat sekarang Kecamatan

Bunut telah dimekarkan menjadi: Kecamatan Bandar Petalangan. Kecamatan Bunut sendiri sebagai Kecamatan Induk, dan Kecamatan Bandar Petalangan sebagai Kecamatan pemekaran.

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk 2019

No	Desa/kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Desa (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Merbau	1.222	34,75	35
2	Petani	1.199	30,97	39
3	Pangkalan bunut	1.987	38,85	51
4	Lubuk mas	787	28,32	28
5	Balam merah	1.936	46,36	42
6	Bagan laugh	1.746	40,43	43
7	Sungai buluh	4.976	78,93	63
8	Lubuk mandian gajah	749	29,62	25
9	Keriung	504	27,45	18
10	Sialang Kayu Batu	1.952	28,43	69
	Bunut	17.058	384,11	44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan 2019

Sedangkan letak wilayahnya adalah letak 0,298 lintang selatan, 102,1997 bujur timur. Berdasarkan data Kecamatan yaitu. Wilayah administrasi Desa/kelurahan yang terbesar adalah sungai buluh dengan mencapai 78,93 km² sedangkan Desa keriuang merupakan Desa terkecil yang 27,45km² kemudian di susul Desa/kelurahan lubuk mas dan Desa Sialang Kayu Batu masing-masing 28,32km² dan 28,43km².

4. Letak Wilayah Dan Geografis Desa Sialang Kayu Batu

- Batas-batas luas wilayah

Desa Sialang Kayu Batu merupakan salah satu Desa dari 10 Desa/kelurahan yang ada diwilayah kecamatan bunut Kabupaten Pelalawan. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Mandian Gajah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sialang Bungkok
 - Sebelah timur berbatasan dengan Lubuk Keranji Timur
 - Sebelah barat berbatasan dengan Desa Balam Merah
- Iklim

Desa Sialang Kayu Batu merupakan daerah gambut yang bagus untuk dimanfaatkan sebagai wilayah perkebunan kelapa sawit dan akasia dengan beberapa Perusahaan yang ada dengan mayoritas petani serta yang dengan iklim tropis yaitu musim kemarau (panas) dan musim hujan.

B. Keadaan Penduduk

Desa Sialang Kayu Batu merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan bunut Kabupaten Pelalawan. Desa Sialang Kayu Batu termasuk salah satu Desa yang dimekarkan pada Tahun 2005. Desa Sialang Kayu Batu dengan luas 32Km² terletak dari kota pekanbaru sekitar 122 KM dengan jumlah penduduk sebanyak 1.478 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 765jiwa dan perempuan 713jiwa.

Tabel IV.3 :Jumlah Penduduk Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

No	Umur	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	0-5 Tahun	108 jiwa	13,7%
2	6-12 Tahun	109 jiwa	13,6%
3	13-25 Tahun	203 jiwa	7,30%
4	26-55 Tahun	731 jiwa	20,2%
5	56 Tahun keatas	113 jiwa	13,1%
Jumlah		1.478 jiwa	100%

Sumber : Kantor Desa Sialang Kayu Batu , 2020

1. Tingkat Pendapatan Dan Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Sialang Kayu Batu dominan adalah karyawan swasta, petani, wiraswasata, dan lain-lain. Hal ini ditunjukkan dengan banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta sebanyak 556 jiwa dan masyarakat yang memiliki mata pencaharian petani adalah 160 jiwa. Hal ini dapat secara rinci terlihat pada tabel mata pencaharian penduduk Desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

Tabel IV.4 : Mata pencaharian masyarakat Desa Sialang Kayu Batu

No	Mata pencaharian	Jumlah	persentase
1	Karyawan Swasta	556 jiwa	65,5
2	Wiraswasta	125 jiwa	15
3	Petani	160 orang	19
4	PNS	4 orang	0,5
Jumlah		845 jiwa	100%

Sumber : Kantor Desa Sialang Kayu Batu 2020

Suatu masyarakat dikaitkan dengan pendapatan dan mata pencaharian dimana mayoritas bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit bernama PT.SERIKAT PUTRA sehingga Desa Sialang Kayu Batu ini memiliki masyarakat yang dalam lingkup kehidupannya bertempat tinggal di daerah perkebunan kelapa sawit dibawah naungan PT.SERIKAT PUTRA itu sendiri. Dan kemudian sisa nya bermata pencaharian petani baik memiliki perkebunan kelapa sawit ataupun karet sendiri yang memang merupakan komoditas utama di Desa Sialang Kayu Batu ini

2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang dicapai manusia juga merupakan dampak dari tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Perkembangan dan komuditas lingkungan pendidikan sangat menjanjikan bagi perkembangan kehidupan

ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian pendidikan dan kualitas pendidikan akan memiliki peluang dan kemampuan dalam usaha dalam mengembangkan wilayahnya dan akan memberikan pengehasilan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikan dan mata pencahariannya.

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemauan suatu kehidupan ekonomi masyarakat dan kesatuan pembangunan masyarakat dalam suatu daerah. Dengan pendidikan pula, daerah dapat mengembangkan sumber daya manusia yang lebih baik dan tingginya kualitas penduduk dalam bidang pendidikan maka akan lebih cepat menciptakan kemajuan dan pengembangan yang lebih efektif dalam segala aspek kehidupan.

Tabel IV.5 :Jumlah Penduduk Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah/buta huruf	178 Jiwa	15%
2	Tidak tamat Sekolah dasar	273 Jiwa	22%
3	Tamat Sekolah dasar	437 jiwa	36%
4	Tamat Sekolah menengah pertama	187 jiwa	15%
5	Tamat sekolah menengah umum/kejuruan	132 jiwa	11%
6	Tamat akademi/perguruan tinggi	21 jiwa	1%
Jumlah		1.228 jiwa	100%

Sumber : Kantor Desa Sialang Kayu Batu 2020

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Mayoritas penduduk Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut adalah warga pendatang seperti: jawa, batak dan minang yang sangat kuat memeluk agama islam dan selanjutnya beragama Kristen. Berdasarkan komposisi penduduk yang

ada di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sejumlah 94% penduduknya menganut agama islam dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel IV.6 :Jumlah Masyarakat Desa Sialang Kayu Batu Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut

No	Agama	Jumlah(Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	1254 jiwa	99%
2	Kristen katolik	10 jiwa	0,1%
Jumlah		1264 jiwa	100%

Sumber : Kantor Desa Sialang Kayu Batu 2020

Berbicara mengenai agama dan kepercayaan yang di anut oleh masyaakta tidak lepas dari sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Desa Sialang Kayu Batu , adapun sarana yang ada di Desa Sialang Kayu Batu dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.7 : Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Sialang Kayu Batu

No	Sarana Peribadatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Masjid	2 unit	100%
2	Gereja	-	-
Jumlah		2 unit	100%

Sumber : Kantor Desa Sialang Kayu Batu 2020

Dari Tabel diatas diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang berada di Desa Sialang Kayu Batu berjumlah 2 unit menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat setempat beragama islam/muslim. Sedangkan fasilitas bagi penganut lain yaitu agama Kristen tidak ada tempat beribadatan dimana hanya 10 jiwa yang Bergama tersebut sehingga mereka beribadah di Desa sebelah yang terdekat yaitu Desa angkasa yang mayoritas agama Kristen lebih banyak.

4. Kesehatan

Kesehatan adalah bagian terpenting dalam pembangunan dan jalannya perekonomian dimana seseorang dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila tubuhnya dalam keadaan sehat. Disamping itu kesehatan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, maka dari itu di Desa sialang kayu batu terdapat sarana kesehatan yaitu:

Tabel IV.8 : Sarana Kesehatan Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

No	Sarana kesehatan	Jumlah
1	Polindes	-
2	Posyandu	1 unit
Jumlah		1 unit

Sumber: Kantor Desa Sialang Kayu Batu 2020

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu kurang memadai dikarenakan tidak adanya puskesmas sehingga ketika masyakat ada yang sakit harus menempuh 18km untuk bisa sampai di puskesmas Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Di Desa Sialang Kayu Batu terdapat posyandu untuk membantu menjaga kesehatan untuk ibu hamil dan anak balita dan satu puskesmas tambahan di Desa untuk masyarakat dan posyandu lansia.

5. Bidang kelembagaan

Di Desa Sialang Kayu Batu terdapat beberapa kelembagaan untuk beraktivitas menjalin hubungan masyarakat dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain untuk menjalin komunikasi yang baik sehingga pemanfaatan dari lembaga

pemberdayaan bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik dilihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel IV.9 : Jumlah bidang kelembagaan di Desa Sialang Kayu Batu

NO	Nama	Jumlah pengurus	Jumlah anggota
1	LKMD	1	11 orang
2	PKK	1	27 orang
3	Remaja Masjid	3	15 orang
4	Perkumpulan Wirid Masjid	4	80 orang
5	Karang taruna	1	30 orang
Jumlah		10	163 orang

Sumber : Kantor Desa Sialang Kayu Batu 2020

C. Visi Dan Misi Tim Penggerak Pkk

1. Visi

Adapun Visi PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut;

“Terwujudnya Keluarga Yang Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkahlak Mulia, Berbudhi Luhur, Sehat Sejahtera, Maju, Mandiri, Berkesetaraan Hukum, Dan Kesadaran Lingkungan”.

2. Misi

Misi PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut:

Memberdayakan Masyarakat Dan Menciptakan Kondisi Untuk Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat(SDM) Sehingga Mampu Membangun Dirinya Berdasarkan Potensi, Kebutuhan Aspirasi Dan Kemenangan Yang Ada yaitu;

1. Meningkatkan mental spiritual, menghayati, dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945 menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia(HAM) demokrasi, kesetiakawanan sosial dan gotong royong.

2. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan keluarga, dalam upaya turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, dengan memanfaatkan tanah pekarangan(PTP).
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, membiasakan hidup berencana dan menabung.
5. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian mampu melaksanakan program-program yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

3. Tugas pokok dan fungsi Tim Penggerak PKK

PKK Desa Sialang Kayu Batu mempunyai tugas dan Fungsi dalam membantu Pemerintah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas PKK meliputi :

- 1) Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda (Rapat Kerja Daerah) Kabupaten/Kota.
- 2) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
- 3) Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/ Lingkungan, RW dan RT agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
- 4) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

- 5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- 6) Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- 7) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/kelurahan.
- 8) Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- 9) Melaksanakan tertib administrasi.
- 10) Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Adapun dalam kegiatannya PKK Desa Sialang Kayu Batu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK.
2. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK. Untuk efisiensi kerja dalam pengurusan PKK maka telah diadakan pembagian tugas, wewenang pengurus, sesuai porsi dan bidang tugasnya :

- 1) Ketua TP PKK Bertanggung jawab atas jalannya kegiatan baik di dalam maupun di luar, memimpin dan mengkoordinasikan dan membina anggota pengurus.
- 2) Wakil Ketua PKK Mewakili Desa atau menunjuk seorang pengurus dalam hubungan organisasi dan dalam keadaan menDesak, bersama-sama pengurus menentukan kebijaksanaan
- 3) Sekretaris Bertanggung jawab atas mekanisme administrasi kesekretariatan dan mencatat merekap kegiatan pengurus
- 4) Bendahara Mengelola kas umum, tanggung jawab atas mekanisme dan sirkulasi keuangan
- 5) Anggota Pengurus TP-PKK yang bukan merupakan perwakilan dari suatu organisasi, lembaga, dan partai politik lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, TP-PKK dalam susunan keanggotaan TP-PKK Gampong dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) terdiri atas

1. Pokja I, Mengkoordinasikan bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan bidang gotong royong
2. Pokja II, Mengkoordinasikan bidang Pendidikan dan Keterampilan dan bidang pengembangan kehidupan berkoperasi
3. Pokja III, Mengkoordinasikan bidang Pangan, bidang Sandang dan bidang perumahan dan tatalaksana rumah tangga
4. Pokja IV, Mengkoordinasikan bidang Kesehatan, bidang Kelestarian Lingkungan Hidup dan bidang Perencanaan Sehat.

1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TP.PKK

**Tabel IV.10 : Daftar Kepengurusan PKK di Desa Sialang Kayu Batu
Periode 2017-2022**

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
1	Yunarlis	Ketua PKK
2	Rabnawati	Wakil Ketua
3	Irawati Putri	Sekretaris I
4	Risya Maulida	Sekretaris II
5	Wiwik Supriati	Bendahara I
6	Heni Sugiarti	Bendahara II
7	Dedek Wulandari	Ketua Pokja I
8	Ratna	Anggota
9	Reni Puspita	Anggota
10	Nurhaimah	Wakil Ketua
11	Yuspiati	Anggota
12	Yusliana	Ketua Pokja II
13	Sri Yanim	Anggota
14	Rohayani	Anggota
15	Leli Diniarti	Anggota
16	Suryani	Anggota
17	Jumiati	Ketua Pokja III
18	Siti Kholifah	Anggota
19	Puji Astuti	Anggota
20	Yusnilawati	Anggota
21	Marjianti	Anggota
22	Yunelva Arinda Dewi	Ketua Pokja IV
23	Susilawati	Anggota
24	Rina Tri Ningsih	Anggota
25	Mira Asmara	Anggota
26	Marianti	Anggota
27	Ernawati	Anggota

Sumber: Rapat Penetapan Pengurus Tim PKK di Desa Sialang Kayu Batu 2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum membahas mengenai implementasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, terlebih dahulu penulis menguraikan beberapa identitas Responden.

Identitas Responden ini diperlukan guna memberikan gambaran tentang signifikansi antara data dari Responden dengan analisis yang dilakukan guna menjawab tujuan penelitian dimaksud. Dalam pelaksanaan penyebaran kuisioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada Responden. Maka langkah awal yang harus penuh adalah berupa identitas Responden, dan yang dijadikan Responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan disajikan sebagai sampel.

1. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha guna mengetahui kepribadian atau kemampuan seseorang, cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku dari setiap orang. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini bahwa dengan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tingkat analisa dalam menilai implementasi program Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut, maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Responden di Desa Sialang Kayu Batu adalah sebagai berikut:

Tabel V.1: Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Dari Unsur PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	SD/Sederajat	1	10%
2	SLTP/Sederajat	2	20%
3	SLTA/Sederajat	3	30%
4	D.III	2	20%
5	Sarjana (S.1)	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari tabel V.1 tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan Responden penelitian di Desa Sialang Kayu Batu untuk anggota PKK terdiri dari 10 Responden, yaitu untuk Responden yang berpendidikan SD/Sederajat sebanyak 1 orang atau sekitar 10%, kemudian yang berpendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 2 orang atau sekitar 20%, selanjutnya berpendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 3 orang atau sekitar 30%, kemudian Responden yang berpendidikan D.III sebanyak 2 orang atau sekitar 20%, selanjutnya Responden yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 2 orang atau sekitar 20%.

Selanjutnya dapat pula dilihat pada tingkat pendidikan Responden penelitian dari unsur masyarakat Desa Sialang Kayu Batu yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel V.2 : Tingkat Pendidikan Reponden Dari Unsur Masyarakat Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	SD/Sederajat	26	28%
2	SLTP/Sederajat	36	38%
3	SLTA/Sederajat	29	31%
4	D.III	-	-
5	Sarjana (S.1)	3	3%
Jumlah		94	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2020

Dari tabel V.2 diatas terlihat bahwa mayoritas tingkat pendidikan Responden penelitian dari unsur masyarakat Desa Sialang Kayu Batu, untuk Responden yang berpendidikan SD/Sederajat sebanyak 26 oarang atau 28%, kemudian untuk Responden SLTP/Sederajat sebanyak 36 orang atau 38%, untuk Responden yang berpendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 29 orang atau 31%, kemudian untuk Responden yang berpendidikan D.III nihil atau 0% sedangkan Responden yang berpendidikan Sarjana (S.1) sebanyak 3 orang atau sekitar 3%.

2. Tingkat Umur

Usia dapat menjadi ukuran kematangan atau kedewasaan dalam berfikir dan bertindak sehingga sangat berpengaruh untuk penentuan kemampuan dan pola pikir serta produktifitas kerja. Dalam hal ini pula dilihat pada tingkat analisis yang akan mempengaruhi Responden dalam pengisian kuisisioner. Berikut dijelaskan identitas Responden penelitian di Desa Sialang Kayu Batu berdasarkan pada tingkat umur dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Tingkat Umur Pada Responden Penelitian Dari Unsur PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	-	-
2	31-40	8	80%
3	41-50	2	20%
4	>50	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari tabel V.3 diatas, maka dapat diketahui bahwa tingkat umur Responden penelitian dari unsur anggota PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 10 Responden, yaitu Responden berumur 21-30 Tahun yaitu tidak ada, untuk Responden yang berumur 31-41 Tahun yaitu sebanyak 8 orang atau 80%, kemudian Responden yang berumur 41-50 yaitu sebanyak 2 orang atau 20%, dan untuk Responden berumur >50 Tahun tidak ada.

Selanjutnya dapat pula dilihat tingkat umur Responden penelitian dari unsur masyarakat di Desa Sialang Kayu Batu yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel V.4 : Tingkat Umur Reponden Dari Unsur Masyarakat Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

NO	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	18	19%
2	31-40	39	41%
3	41-50	26	28%
4	>50	11	12%
Jumlah		94	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari tabel V.4 diatas, maka dapat diketahui bahwa tingkat umur Responden penelitian dari unsur masyarakat Desa Sialang Kayu Batu yang terdiri dari 96 orang Responden, yaitu Responden yang berumur 21-30 Tahun sebanyak 10 orang atau 20%, kemudian Responden yang berumur 31-40 Tahun sebanyak 40 orang atau 42%, selanjutnya Responden yang berumur 41-50 Tahun sebanyak 26 orang atau 27% dan untuk Responden yang berumur >50 Tahun sebanyak 11 orang atau 11%.

3. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan elemen genetika dari Responden. Jenis kelamin Responden terbagi dua yaitu : jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kemudian dalam penelitian ini identitas Responden berdasarkan jenis kelamin dimaksud agar dapat mengetahui manfaat dalam setiap program dan sikap dalam menjawab kuisisioner yang sudah di sebarakan.

Tabel V.5 : Jenis Kelamin Pada Responden Penelitian Dari Unsur anggota PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Laki-laki	-	-
2	Perempuan	10	100%
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari tabel V.5 diatas, dapat dilihat bahwa jenis kelamin Responden penelitian dari unsur anggota lembaga PKK di Desa Sialang Kayu Batu yang berjumlah 10 orang, Responden penelitian laki-laki sebanyak 0 atau tidak ada karna PKK itu sendiri mayoritas oleh ibu-ibu atau berjenis kelamin perempuan,

sedangkan Responden jenis kelamin perempuan sebanyak 10 orang atau sebanyak 100%.

Selanjutnya dapat pula dilihat jenis kelamin Responden penelitian dari unsur masyarakat Desa Sialang Kayu Batu yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.6 : Jenis Kelamin Reponden Dari Unsur Masyarakat Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Laki-laki	24	26%
2	Perempuan	70	74%
	Jumlah	94	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari hasil tabel V.6 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jenis kelamin Responden dari unsur masyarakat berjumlah 94 orang, Responden penelitian berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang atau sekitar 26% sedangkan Responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 70 orang atau sekitar 74%.

4. Mata Pencaharian

Sebagai data pelengkap penelitian, maka dapat dilihat mata pencarian dari Responden penelitian di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut sebagai aktivitas pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis mata pencaharian Responden penelitian, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.7 : Mata Pencaharian Responden Penelitian Dari Unsur PKK Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Karyawan Swasta	1	10%
2	Guru hoNorer	1	10%
3	Bidan	1	10%
4	PNS	2	20%
5	IRT	5	50%
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.7 diatas, dilihat bahwa mata pencaharian Responden penelitian berjumlah 10 orang dengan mata pencaharian Karyawan swasta sebanyak 1 orang atau 10%, kemudian mata pencaharian jenis guru hoNorer sebanyak 1 orang atau 10%, selanjutnya mata pencaharian berjenis bidan sebanyak 1 orang atau 10% sedangkan mata pencaharian berjenis PNS sebanyak 2 orang atau 20% dan Pengurus Rumah Tangga (IRT) sebanyak 5 orang atau sejumlah 50%.

Selanjutnya dapat pula dilihat mata pencaharian Responden penelitian dari unsur masyarakat yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.8 : Mata Pencaharian Responden Penelitian Dari Unsur Masyarakat Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Karyawan Swasta	32	34%
2	Wiraswasta	2	2%
3	Pedagang	4	4%
4	PNS	2	2%
5	IRT	54	58%
Jumlah		94	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel V.8 diatas, dapat dilihat bahwa mata pencaharian dari unsur masyarakat Desa Sialang Kayu Batu berjumlah 94 orang, Responden penelitian bermata pencaharian karyawan swasta sebanyak 32 orang atau 34%, selanjutnya Responden penelitian bermata pencaharian wiraswasta sebanyak 2 orang atau 2% sedangkan Responden penelitian bermata pencaharian pedagang sebanyak 4 orang atau sekitar 4%, Responden penelitian bermata pencaharian PNS sebanyak 2 orang atau sekitar 2% dan Responden penelitian sebagai Pengurus Rumah Tangga (IRT) sebanyak 54 orang atau sekitar 58%.

B. Hasil Penelitian Tentang Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan)

Untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, maka dapat dilihat dari empat indikator menurut Edward III yang sangat menentukan keberhasilan implementasi program diantaranya sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan kepada orang lain. Implementasi program akan efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Kemudian pengetahuan atas apa yang akan anggota/ Tim Penggerak PKK kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi antara ketua PKK ke anggota PKK dan anggota PKK dengan

masyarakat berjalan dengan baik sehingga kegiatan akan berjalan dengan tepat dan penyaluran informasi kepada masyarakat juga ditangkap dengan baik.

Berikut jawaban Responden penelitian dari unsur anggota PKK di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari indikator **Komunikasi** yang dilaksanakan dua item penilaian yaitu : kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan dan konsistensi perintah yang diberikan kepada pelaksana, untuk lebih tepatnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.9: Tanggapan Responden penelitian dari unsur (Anggota PKK) Desa mengenai implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari hal Komunikasi

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan	10 (100%)	-	-	10 (100%)
2	Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan	10 (100%)	-	-	10 (100%)
Jumlah		20	-	-	20
Rata-rata		10	-	-	10
Persentase		100%	-	-	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari hasil tabel V.9 diatas dapat diketahui dari penyebaran kuisioner dengan Responden anggota PKK yang berjumlah 10 orang tersebut, adapun Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang atau sekitar 100%,

sedangkan Responden yang menjawab cukup terlaksana dan Responden yang menjawab tidak terlaksana tidak ada atau 0%.

Berdasarkan hasil tanggapan Responden dari unsur anggota PKK, dapat di analisa dan di tarik kesimpulan bahwasanya implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) (studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan bunut Kabupaten Pelalawan) dilihat dari hal komunikasi berada pada persentase 100% pada kategori “Terlaksana” dengan alasan bahwa kejelasan informasi dan sosialisasi dari dinas bidang kesehatan seperti puskesmas Desa serta seluruh kegiatan Program Kesehatan yang dilaksanakan Pokja IV telah dilakukan dengan baik dan konsisten seperti contohnya Posyandu dengan ditujukan masyarakat sebagai sasaran utamanya dan sebagai penerima manfaat dan informasi.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan Responden pada unsur masyarakat yang berjumlah 94 orang Responden mengenai indikator komunikasi yang terdiri dari dua item yang dinilai yaitu : kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan dan konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10: Tanggapan Responden penelitian dari unsur (Masyarakat) Desa mengenai implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari hal Komunikasi

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan	75 (80%)	19 (20%)	-	94 (100%)
2	Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan	86 (91%)	8 (9%)	-	94 (100%)
Jumlah		161	27	-	188
Rata-rata		80	14	-	94
Persentase		85%	15%	-	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari tabel V.10 diatas dapat dilihat bahwa hasil penyebaran kuisioner dari unsur masyarakat yang berjumlah 96 orang tersebut, adapun Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 80 orang atau sekitar 85% sedangkan Responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 14 orang atau sekitar 15%, dan tidak ada Responden yang menjawab kurang terlaksana atau 0%.

Dari 85% masyarakat yang menjawab terimplementasi, sebagian besar alasan mereka bahwa komunikasi yang dilakukan oleh anggota PKK dalam beberapa kegiatan dan salah satu-nya Program Kesehatan ini terlaksana serta sangat memberikan manfaat dan dapat dirasakan masyarakat seperti contohnya Posyandu. Posyandu ini dapat memberikan manfaat kepada ibu hamil untuk mengecek kandungan dan mempermudah persalinan sampai sosialiasi penggunaan KB yang cocok bagi para ibu-ibu, hingga mengetahui pertumbuhan balita dan

bayi dan pemberian vitamin dan vaksin agar dapat mengetahui sejak dini tentang penyakit stunting yaitu kurangnya pertumbuhan pada anak maupun kelainana pada anak lainnya.

Dari 15% masyarakat yang menjawab cukup terimplementasi, sebagian besar alasan mereka bahwa kegiatan dari Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada Program Kesehatan dari indikator Komunikasi ini kurang menyeluruh bahwa ada yang tidak mendapatkan informasi kegiatan dari Tim Penggerak PKK, misalnya kegiatan pada masa pandemi Covid-19 untuk penyuluhan 3M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak) yang dilihat dari observasi penulis bahwa sasaran dari Tim Penggerak PKK hanya pada ibu-ibu saat kegiatan di sela-sela Posyandu ataupun perkumpulan ibu-ibu sedangkan bapak-bapak sebagian tidak mendapatkan informasi tersebut.

Dari hasil wawancara dengan ibu Yunelva sebagai ketua Pokja IV mengenai komunikasi dari Tim penggerak PKK ke masyarakat :

“Sudah dapat dipahami dan ditangani dengan baik mulai dari petugas medis ataupun kader kesehatan Desa sangat peduli dengan masyarakat, sehingga komunikasi berjalan dengan baik antara anggota PKK dengan kader kesehatan baik dari puskesmas ataupun Dokter Desa serta Bidan Desa. ”. (Wawancara, Rabu 16/12/20, 14.00)

“Beberapa kegiatan seperti penyuluhan tentang kegiatan kesehatan pada Posyandu diantaranya: Mensosialisasikan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) dalam menurunkan angka anak yang kurang gizi, penyuluhan ibu hamil agar tidak stunting (dalam program 1000 hari kehidupan) mulai hamil hingga anak berumur dari 1bln-2th, Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, makanan pendamping Air Susu ibu (MP-ASI) serta pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita dan Ibu Hamil. Kemudian ada lomba antar Desa yaitu menu ISI PIRINGKU Yaitu menu makanan bergizi dirumah dengan memanfaatkan bahan pokok makanan yang ada dilingkungan sekitar yang memiliki kandungan gizi yang baik. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan Pokja IV yang dibantu dengan dinas kesehatan serta puskesmas Desa untuk masyarakat sehingga tujuan

keluarga sehat bila anak dan istri sehat suami juga semangat kerja kan begitu". (Wawancara, Rabu 16/12/20, 14.00)

Kemudian dari hasil wawancara dengan ibu Yunarlis sebagai ketua PKK mengenai indikator Komunikasi :

"Beberapa jenis kegiatan pada program Kesehatan seperti : sosialisasi administrasi dilakukan setiap Tahun untuk pokja 1 hingga pokja 4, lalu pelaksanaan kegiatan penyuluhan stunting, penyuluhan tentang kontrasepsi, penyuluhan pola asuh anak, kemudian kegiatan Bumantik (ibu-ibu pemantau jentik-jentik) pada musim hujan serta PHBS (pola hidup sehat) seperti pengecekan jamban dirumah masyarakat, dan membina pelayanan Posyandu (pos pelayanan terpadu) untuk para anak dan ibu hamil serta pada masa pandemic Covid-19 untuk penyuluhan 3M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak), kemudian beberapa kegiatan penyuluhan lainnya. kegiatan ini juga tidak lepas dari beberapa kunjungan dinas atau instansi lainnya seperti dinas kesehatan atau berasal dari puskesmas ataupun anggota dinas pendidikan, kemudian dinas lingkungan hidup yang akan memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK dan masyarakat". (Wawancara, Rabu 16/12/20, 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan saat penelitian terlihat dari pelaksanaan kegiatan kesehatan bahwa komunikasi antar kader PKK dan ketua pokja cukup baik dengan keterbukaan ketua ke anggota PKK walaupun ada beberapa pelaksanaan kegiatan kesehatan dalam bentuk penyuluhan ketua PKK tidak hadir serta kurangnya bimbingan yang di lakukan ketua PKK dalam memberikan petunjuk upaya dan inovasi dalam kegiatan seperti membandingkan dan bercermin kegiatan yang ada di beberapa Desa di Kecamatan Bunut kemudian dapat dilaksanakan di Desa Sialang Kayu Batu seharusnya pemberian petunjuk dan inovasi ini datang dari ide-ide Ketua PKK kemudian di rapatkan. Adapun yang dikatakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disusun namun kegiatan tersebut masih belum di susun sesuai administrasi PKK pada program

Kesehatan dimana pencatatan dalam buku kegiatan masih sulit dilakukan oleh Pokja IV.

Selanjutnya berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai sub indikator “ konsistensi perintah dalam pelaksanaan kegiatan” pada indikator Komunikasi bahwa salah satu kegiatan pokja IV pada program kesehatan adalah Posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulannya pada pertengahan tanggal, dengan pemberian informasi atau pengumuman kegiatan posyandu melalui speaker masjid. Sehingga informasi yang didapatkan hanya melalui rumah terdekat. Namun ketika jarak rumah jauh dari masjid maka pemberian informasi itu dapat di salurkan melalui sosial media antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan kegiatan posyandu pada balita dan ibu hamil dilaksanakan rutin pada pukul 14.00-16.00 WIB. Serta kesuaian keahlian dari sumber daya manusia yaitu anggota PKK sebagai komunikator dalam kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang ada pada Program Kesehatan. Disamping itu kegiatan sosialisasi seringnya dilakukan saat kegiatan Posyandu di sela-sela pendaftaran maka akan di lakukan sosialisasi dengan infokus dari puskesmas atau dinas kesehatan didampingi dokter dan bidan beserta kader anggota PKK yang telah ditugaskan sebagai pemberi informasi.

Pada kegiatan bumantik (ibu-ibu pemantau jentik) dilaksanakan pada pendekatan musim hujan pertahun dengan membeli dan menaburkan obat Abate (Temephos) yaitu obat jentik nyamuk di setiap bak-bak rumah masyarakat ataupun bagian-bagian yang tergenang air yang dapat menjadi sarang pertumbuhan nyamuk seperti selokan ataupun tangki-tangki air. Di Desa Sialang Kayu Batu terdapat 408KK dengan pembagian tugas dari anggota PKK dibantu

dengan dasawisma yaitu perkumpulan masyarakat 10-20KK dengan sistem pembagian per RT untuk 3-5 orang anggota PKK dibantu dengan beberapa relawan dari RT. Kemudian dengan memberikan informasi singkat bagaimana cara menjaga lingkungan agar terhindar dari penyakit DBD dengan memberantas sarang nyamuk yang dapat menjadi wasah perkembangbiakan nyamuk.

Kemudian walaupun masih terdapat beberapa kendala di sebabkan pemberian informasi kepada masyarakat kurang menyeluruh seperti kegiatan posyandu karena hanya pengumuman dari speker masjid sehingga ada beberapa kendala informasi tersebut tidak sampai kerumah warga disebabkan jarak rumah dengan masjid yang cukup jauh. Serta masih kurangnya komunika rutin antara para ketua Pokja PKK dengan Ketua PKK dalam kegiatan seperti pada rapat bulanan dan pengawasan kegiatan. Adapun administrasi dari Program kesehatan pencatatan serta dokumen penting harus dilakukan serta masih ada pokja bergabung dan berkegiatan bersama antara pokja satu dengan yang lain disebabkan program dari dari pokja hampir sama sehingga kegiatan sering digabungkan.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwasanya implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan) dilihat dari hal Komunikasi dengan dua item penilaian yaitu kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan dan konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan berada pada kategori **“Cukup Terimplementasi”**

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan menurut Edward III, dalam implementasi kebijakan beberapa indikator yang mengukur sumberdaya diantaranya; Staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

Berikut jawaban Responden penelitian dari unsur anggota PKK dan masyarakat di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari indikator **Sumber Daya** yang dilaksanakan dua item penilaian yaitu : kecukupan staf berupa sumber daya utama dan fasilitas fisik ,untuk lebih tepatnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.11: Tanggapan Responden penelitian dari unsur (Anggota PKK) Desa mengenai implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) (studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan) dilihat dari hal Sumber Daya

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Kecukupan staf berupa sumber daya utama	10 (100%)	-	-	10 (100%)
2	Fasilitas fisik	5 (50%)	5 (50%)	-	10 (100%)
Jumlah		15	5	-	20
Rata-rata		7	3	-	10
Persentase		75%	25%	-	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari tabel V.12 diatas dapat dilihat bahwa hasil penyebaran kuisisioner dengan Responden yang berjumlah 10 orang tersebut, ada Responden yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang atau sekitar 75%, kemudian Responden

yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 3 orang atau sekitar 25% dan tidak ada Responden yang menjawab Kurang Terlaksana atau 0%.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan Responden pada unsur masyarakat yang berjumlah 94 orang Responden mengenai indikator sumber daya yang terdiri dari dua item yang dinilai yaitu kecukupan staf berupa sumber daya utama dan fasilitas fisik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.12: Tanggapan Responden penelitian dari unsur masyarakat Desa mengenai implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari hal Sumber Daya

NO	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Kecukupan staf berupa sumber daya utama	33 (35%)	53 (56%)	8 9%	94 (100%)
2	Fasilitas fisik	61 (65%)	30 (32%)	3 (3%)	94 (100%)
Jumlah		94	82	11	187
Rata-rata		47	41	6	94
Persentase		50%	44%	6%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari tabel V.12 diatas dapat dilihat bahwa hasil penyebaran kuisisioner dengan Responden yang berjumlah 94 orang tersebut, ada Responden yang menjawab Terlaksana sebanyak 47 orang atau sekitar 50%, kemudian Responden yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 41 orang atau sekitar 44% dan Responden yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 6 orang atau 6%.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Yunarlis sebagai ketua PKK mengenai indikator Sumber Daya, beliau menjawab bahwa:

“ Sumber daya sudah sangat mencukupi, anggota Tim Penggerak PKK sejumlah 27 orang termasuk saya, dan pada program Kesehatan yang melaksanakan kegiatan dibentuk pada pokja IV sudah baik serta fasilitas fisik untuk kegiatan seperti Posyandu telah ada gedung, serta fasilitas pendukung seperti timbangan bayi, pengukur tinggi, serta alat-alat medis yang telah disediakan”. (Wawancara, Rabu 16/12/2020, 9:10 WIB)

Kemudian berdasarkan wawancara dengan ibu Yunelva sebagai ketua Pokja IV mengenai Indikator Sumber Daya, beliau menjawab bahwa :

“ Sudah cukup baik karna kader yang di rekrut selama ini sudah bisa bertanggung jawabkan tugas-tugas yang diberikan menurut pokja masing-masing jika ada yang tidak melaksanakan tugasnya maka anggota yang lain akan membantu menutupinya. Mengenai fasilitas untuk posyandu cukup baik namun untuk fasilitas pendukung lainnya masih perlu untuk dilengkapi dan fasilitas umum pada pokja-pokja yang lainnya”. (Wawancara, Rabu 16/12/2020, 14:07 WIB)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara mengenai indikator penelitian bahwa terlihat pada sumber daya manusia atau para anggota PKK yang berjumlah 27 orang sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa yang berlaku. Namun pada beberapa fasilitas publik masih disayangkan akan kekurangan beberapa keperluan untuk melengkapi kegiatan para ibu-ibu PKK. Seperti pada program kesehatan alat pengukur dan penimbangan masih sangat tradisional dan manual yang membutuhkan kerja tangan manusia langsung sehingga data tidak valid atau adanya kesalahan penghitungan pada data anak.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai sumber daya dengan kecukupan staff pada lembaga PKK ini, namun masih perlu adanya pembagian tugas yang jelas. Kemudian mengenai pendanaan dari Anggaran Dana Desa hanya sekitar 2,2% dan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya

sehingga tidak ada perubahan yang lebih spesifik pada fasilitas sarana dan prasarana. Serta fasilitas fisik dan perlengkapan masih kurang lengkap seperti pada posyandu tidak ada ruang tunggu duduk untuk antrian, sehingga ketika lama mengantri ibu hamil dan orang tua balita hanya menunggu di luar ruangan atau sekedar duduk diatas kendaraannya terlebih dahulu. Lalu fasilitas gedung sudah cukup bagus dan luas serta adanya fasilitas pendukung seperti penimbang berat balita, pengukur tinggi balita, dan peralatan vitamin/vaksin kemudian timbangan untuk ibu hamil, alat pengukur gerak janin dan alat thermometer untuk mengukur tensi pada ibu hamil serta perlu di lengkapi dan di ganti ketika peralatan medis ataupun fisik juga terlalu tradisonal.

Kemudian kegiatan observasi pada item penilaian Sumber Daya kegiatan Kesehatan yang dilaksanakan PKK, anggota yang terlihat dalam kegiatan sosialisasi,lomba,rapat serta kegiatan lainnya tidak seluruhnya ikut terlibat dimana juga dibantu oleh kader Kesehatan serta dokter. Namun jika sumber daya manusia lebih banyak maka seluruh kegiatan dalam 10 Program PKK akan terlaksana dengan baik. Kemudian kendala dalam bidang kesehatan tidak adanya pencatatan administrasi kesekretariatan dan keuangan serta administrasi surat masuk dan surat keluar serta pelaporan sesuai dengan bidang kesehatan untuk mengetahui perkembangan kegiatan administrasi dan kesekretariatan pencatatan kegiatan oleh pokja-pokja masih sangat kurang disebabkan anggota PKK yang masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam administrasi dan tingkat pendidikan anggota kader.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, observasi penulis menyimpulkan bahwasanya implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) (studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan bunut Kabupaten Pelalawan) dilihat dari hal Sumber Daya berada pada kategori “**Cukup Terimplementasi**” .

3. Disposisi

Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi.

Berikut jawaban Responden penelitian dari unsur anggota PKK di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari indikator **Disposisi** yang dilaksanakan dua item penilaian yaitu sikap dari pelaksana program dan jumlah intensif pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.13: Tanggapan Responden Penelitian Dari Unsur (Anggota PKK) Desa mengenai implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari hal Disposisi

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
		3	4	5	6
1	Sikap dari para pelaksana program	4 (40%)	6 (60%)	-	10 (100%)

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
2	Jumlah intensif pelaksana program	10 (100%)	-	-	10 (100%)
	Jumlah	14	6	-	20
	Rata-rata	7	3	-	10
	Persentase	70%	30%	-	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari tabel V.13 diatas dapat dilihat bahwa hasil penyebaran kuisisioner dengan Responden yang berjumlah 10 orang tersebut, ada Responden yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang atau sekitar 70%, kemudian Responden yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 3 orang atau sekitar 30% dan tidak ada Responden yang menjawab Kurang Terlaksana atau 0%.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan Responden pada unsur masyarakat yang berjumlah 94 orang Responden mengenai indikator Disposisi yang terdiri dari dua item yang dinilai yaitu sikap dari pelaksana program dan jumlah intensif pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.14: Tanggapan Responden Penelitian Dari Unsur (Masyarakat) Desa mengenai implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari hal Disposisi

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Sikap dari para pelaksana program	42 (45%)	52 (55%)	-	94 (100%)
2	Jumlah intensif pelaksana program	74 (79%)	20 (21%)	-	94 (100%)

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	116	72	-	188
	Rata-rata	58	36	-	94
	Persentase	62%	38%	-	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari tabel V.14 diatas dapat dilihat bahwa hasil penyebaran kuisisioner dengan Responden yang berjumlah 94 orang tersebut, ada Responden yang menjawab Terlaksana sebanyak 58 orang atau sekitar 62%, kemudian Responden yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 36 orang atau sekitar 38% dan tidak ada Responden yang menjawab Kurang Terlaksana atau sebanyak 0%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yunarlis sebagai ketua PKK mengenai indikator Disposisi, beliau menjawab bahwa:

“Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dalam beberapa hal dari sosialisasi ataupun penyuluhan hingga pengecekan akan dapat membantu masyarakat merupakan hal yang patut dibanggakan. Mengenai intensif harus dapat diberikan uang ataupun reward/penghargaan karena tidak semua anggota masyarakat yang bersedia terjun dalam kelompok PKK atau pada beberapa bagian pokok kehidupan termasuk program kesehatan untuk dapat diberikan apresiasi untuk meluangkan waktu dan tenaga”.(Wawancara, Rabu,16/12/2020, 09:22 WIB)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yunelva sebagai ketua Pokja IV mengenai indikator Disposisi, beliau menjawab bahwa :

“Dalam satu program memang dibutuhkan kerjasama dengan Pokja lainnya, tidak bisa sendiri-sendiri membuat kegiatan. Perlu juga persetujuan dan rapat-rapat tertentu untuk Ketua Pokja ketika melakukan beberapa kegiatan atau sosialisasi. Karna sebenarnya semua kegiatan itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Mengenai intensif tidak diberikan hanya sumbangan tenaga dan waktu secara sukarela sehingga tidak dapat menuntut untuk selalu ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan bagi Anggota PKK”.(Wawancara, Rabu 16/12/2020, 14:18 WIB)

Kemudian dari hasil wawancara peneliti dilapangan mengenai indikator Disposisi kegiatan-kegiatan pada Program Kesehatan dapat memberikan manfaat kepada anggota PKK dan masyarakat serta apresiasi kepada anggota PKK yang secara sukarela untuk dapat ikut serta dalam Tim Penggerak PKK untuk menyumbangkan tenaga dan waktu dalam melaksanakan kegiatan. Begitu juga bahwa masyarakat juga ikut menyetujui bahwa intensif juga diperlukan agar anggota PKK melaksanakan perintah dengan baik. Para anggota PKK melaksanakan tugas tidak seluruhnya sesuai dengan kemampuan dikarenakan anggota PKK yang terbatas sehingga pembagian tugas hanya sesuai dengan kemampuan yang terlihat dan pelantikan bagi anggota Tim Penggerak PKK hanya secara sukarela bukan memilih atau recruitment anggota .

Berdasarkan observasi penulis menyimpulkan bahwa program kesehatan yang dilakukan di Desa Sialang Kayu Batu telah sesuai dengan pedoman umum PKK serta menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan dari para anggota PKK Desa. Serta masyarakat juga setuju untuk memberikan intensif berupa uang sebagai semangat untuk melakukan tugas dengan baik serta sebagai hasil atas waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan. Sesuai pedoman umum kegiatan pelaksanaan layanan Posyandu yang memiliki ketentuan khusus, dimana dilakukan pelayanan dengan system 5 Meja.

Selanjutnya dalam “sikap para pelaksana program” masih berupa sikap untuk tidak peduli dengan anggota yang lainnya di tandai dengan pelaksanaan tupoksi yang tidak semuanya sesuai dengan tugasnya misalnya sebagai sekertaris dan kemampuan para kader PKK saat bersosialisasi dengan masyarakat untuk

memberikan informasi terkait dengan kesehatan baik berupa pencegah penyakit seperti penanggulangan terhadap bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang, kemudian penyuluhan HIV/AIDS, kanker, TBC, DBD, perilaku hidup sehat dan bersih serta memelihara kesehatan gigi dan mulut serta lain-lain juga memanfaatkan hasil tanaman TOGA (Tanaman obat keluarga). Sikap dari anggota PKK bahwa kegiatan-kegiatan di dalam program PKK dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan kebanggaan untuk dapat membantu orang lain. Kemudian anggota PKK juga harus mengasah kemampuan speaking bagi kader yang telah mengikuti pelatihan. Tidak jarang pemberian informasi tidak ditangkap oleh masyarakat apabila ketika salah seorang kader memberikan penyuluhan di posyandu dengan demam panggung sehingga tidak fokus dengan materi yang akan di sampaikan.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwasanya implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) (studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan) dilihat dari hal Disposisi berada pada kategori “**Cukup Terimplementasi**”

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.

Berikut jawaban Responden penelitian dari unsur anggota PKK dan masyarakat di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari indikator **Struktur Birokrasi** yang dilaksanakan dua item penilaian yaitu membuat standar operasional prosedur(SOPs) dan Melaksanakan tanggungjawab terhadap program, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.15 : Tanggapan Responden Penelitian Dari Unsur (Anggota PKK) Desa Mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Dilihat Dari Hal Struktur Birokrasi

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Membuat standar operating operating procedures (SOPs)	6 (60%)	4 (40%)	-	10 (100%)
2	Melaksanakan tanggungjawab terhadap program	10 (100%)	-	-	10 (100%)
Jumlah		16	4	-	20
Rata-rata		8	2	-	10
Persentase		80%	20%	-	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari tabel V.12 diatas dapat dilihat bahwa hasil penyebaran kuisisioner dengan Responden yang berjumlah 10 orang tersebut, ada Responden yang menjawab Terlaksana sebanyak 8 orang atau sekitar 80%, kemudian Responden yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 2 orang atau sekitar 20% dan tidak ada.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan Responden pada unsur masyarakat yang berjumlah 94 orang Responden mengenai indikator

Struktur Birokrasi yang terdiri dari dua item yang dinilai yaitu membuat standar operasional prosedur(SOPs) dan Melaksanakan tanggungjawab terhadap program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.16 : Tanggapan Responden Penelitian Dari Unsur (Masyarakat) Desa mengenai implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dilihat dari hal Struktur Birokrasi

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Membuat standar operating procedures (SOPs)	37 (40%)	34 (36%)	23 (24%)	94 (100%)
2	Melaksanakan tanggungjawab terhadap program	47 (50%)	47 (50%)	-	94 (100%)
Jumlah		84	81	23	188
Rata-rata		42	41	11	94
Persentase		45%	43%	12%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2020

Dari tabel V.12 diatas dapat dilihat bahwa hasil penyebaran kuisisioner dengan Responden yang berjumlah 94 orang tersebut, ada Responden yang menjawab Terlaksana sebanyak 42 orang atau sekitar 45%, kemudian Responden yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 41 orang atau sekitar 43% dan untuk Responden yang menjawab Kurang Terlaksana atau sebanyak 11 Orang atau 12%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yunarlis sebagai ketua PKK mengenai Indikator Struktur Birokrasi, beliau menjawab :

“ Sebenarnya setiap Ketua Pokja yang telah terpilih dan beberapa anggota sudah diberikan tugas nya masing-masing, namun ada beberapa kegiatan atau satu Program yang juga memerlukan kerjasama dari Pokja

yang lainnya seperti pada Program Kesehatan mempunyai kegiatan WCK pada rumah-rumah warga yang memiliki tanggungjawab adalah Pokja IV namun juga dibantu dengan Pokja III yang juga berkaitan dengan Program Perumahan tata laksana rumah tangga”.(Wawancara, Rabu 16/12/2020, 9:30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yunelva sebagai ketua Pokja IV mengenai Indikator Struktur Birokrasi, beliau menjawab:

“Setiap kegiatan sudah sesuai dengan keahlian para kader kesehatan seperti pada pelaksanaan satu kegiatan posyandu dibutuhkan 11 orang sebagai petugas penimbang berat badan 1 orang, petugas pengukur tinggi 1 orang, dokter dan suster berjumlah 2 orang, petugas bagian administrasi atau pencatatan 3 orang serta petugas bagian konsumsi 4 orang”. (Wawancara, Rabu 16/12/2020, 14:23 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan bahwa setiap kegiatan PKK pembagian tugasnya sesuai dengan keahlian dari para kader ataupun anggota PKK namun masih terlihat pada program kesehatan masih ada yang melaksanakan tugas bukan sesuai bidangnya seperti program kesehatan pada kegiatan Bumantik(ibu-ibu Pemantau Jentik) dan pengecekan WCK dirumah warga seharusnya hanya Pokja IV yang merupakan bidang atau tugas nya namun Pokja III juga ikut terlibat karna juga sesuai dengan program Perumahan dan tatalaksana rumah tangga untuk melihat lingkungan perumahan masyarakat yang layak atau tidak sehingga tujuan kesehatan masyarakat tercapai.

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan dalam pelaksanaan kegiatan memang tidak dilakukan orang satu pokja saja. Seperti pada Program Kesehatan seperti pada kegiatan posyandu pemberian makanan bergizi pada balita, anak-anak dan ibu hamil juga dibantu oleh Pokja 3 seperti pada program pangan untuk membuat makanan yang empat sehat lima sempurna yang berasal

dari tanaman dan obat-obatan yang ditanam dan dapat mengurangi biaya pengeluaran bahan makanan.

Berdasarkan pedoman dalam tatalaksana kegiatan posyandu meliputi ; KIA (kegiatan Imunisasi Anak), KB (Keluarga Berencana), imunisasi gizi, penanggulangan diare. Pada pelaksanaannya ketentuan pelayanan posyandu sesuai sistem 5 meja sebagai berikut:

- Meja 1 : Pendaftaran
- Meja 2 : Penimbangan berat dan Pengukuran Tinggi
- Meja 3 : Pengisian KMS
- Meja 4 : Penyuluhan Perorangan berdasarkan KMS Atau Penyuluhan bersama dengan masyarakat lain
- Meja 5 : Pelayanan Kesehatan berupa medis.

Adapun berdasarkan Surat Keputusan ataupun sesuai syarat/Kriteria anggota TP PKK di Desa Sialang Kayu Batu :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.
- 3) Jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya
- 4) Mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan
- 5) Peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat.
- 6) Bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi.
- 7) Memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara professional dan bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwasanya implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) (studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan bunut Kabupaten Pelalawan) indikator Struktur Birokrasi yang terdiri dari dua item yang dinilai yaitu membuat standar operasional prosedur(SOPs) dan Melaksanakan tanggungjawab terhadap item penilaian Struktur Birokrasi berada pada kategori “**Cukup Terimplementasi**”.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan anggota PKK mengenai implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) (studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

V.17 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Dari Unsur (Anggota PKK) Desa terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	2	3	4	5	6
1	Komunikasi	10 (100%)	-	-	10
2	Sumber Daya	7 (70%)	3 (30%)	-	10
3	Disposisi	7 (70%)	3 (30%)	-	10
4	Struktur Birokrasi	8 (80%)	2 (20%)	-	10
Jumlah		32	8	-	40
Rata-rata		8	2	-	10
Persentase		80%	20%	-	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020

Dari tabel V.17 rekapitulasi tanggapan Responden masyarakat terhadap variabel implementasi diatas, untuk kategori penilain Terimplementasi yaitu sebesar 80%, untuk kategori penilain Cukup Terimplementasi adalah sebesar 20%, dan untuk kategori penilaian Kurang Terimplementasi adalah 0% dari total keseluruhan Responden anggota PKK sebanyak 10 orang. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) (studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan bunut Kabupaten Pelalawan) dikategorikan “**Terimplementasi**” dengan total persentase sebesar 80%.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan Masyarakat mengenai implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

V.18 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Dari Unsur (Masyarakat) Desa terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Studi Program Kesehatan Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	2	3	4	5	6
1	Komunikasi	80 (85%)	14 (15%)	-	94
2	Sumber Daya	47 (50%)	41 (44%)	6 (6%)	94
3	Disposisi	58 (62%)	36 (38%)	-	94
4	Struktur Birokrasi	42 (45%)	41 (44%)	11 (12%)	94
Jumlah		227	132	17	376
Rata-rata		57	33	4	94
Persentase		61%	35%	4%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020

Dari tabel V.18 rekapitulasi tanggapan Responden masyarakat terhadap variabel implementasi diatas, untuk kategori penilain Terimplementasi yaitu sebesar 61%, untuk kategori penilain Cukup Terimplementasi adalah sebesar 35%, dan untuk kategori penilaian Kurang Terimplementasi adalah 4% dari total keseluruhan Responden anggota PKK sebanyak 94 orang. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian implementasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) (studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan bunut Kabupaten Pelalawan) dikategorikan “**Cukup Terimplementasi**” dengan total persentase sebesar 61%.

C. Faktor Penghambat dalam implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) (Studi program kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan)

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam implemnetasi program kesehatan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Sialang Kayu Batu Kecamtan Bunut Kabupaten Pelalawan yaitu antara lain :

1. Faktor kemampuan dan jenjang pendidikan anggota PKK yang mempengaruhi perkembangan PKK pada bidang administrasi yang mengacu pada Buku Administrasi sesuai Rakernas VII PKK Tahun 2010 bahwa pada bidang administrasi terdapat adanya buku anggota TP.PKK dan anggota PKK, buku agenda surat masuk dan keluar, buku keuangan, buku Notulen, sedangkan di PKK Sialang Kayu Batu hanya terdapat buku kegiatan serta dilengkapi buku pencatatan kegiatan diantaranya buku

tamu dan buku catatan pada masing-masing pokja yang masih belum lengkap dan catatan rapat serta dokumentasi kegiatan yang belum dilengkapi.

2. Faktor internal struktural dimana kurangnya dukungan dari dewan penyantun di Desa Sialang Kayu Batu. Dewan penyantun sendiri harus ikut andil dalam pendukng pelaksanaan program PKK di Desa agar kegiatan-kegiatan 10 Pokok PKK termasuk pada Program Kesehatan terlaksana dan selanjutnya dalam hal ini dewan penyantun adalah Kepala Desa.
3. Faktor teknologi selanjutnya masyarakat yang masih asing dalam pemanfaatan teknologi. Dimana tingkat pendidikan yang akan mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga cukup enggan untuk mendukung kegiatan ataupun ikut terlibat dalam suatu kegiatan dalam memajukan pembangunan di Desa. Juga pemanfaatan teknologi bagi lembaga PKK dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan yang ada di Desa misalnya merekam dan membuat rekaman melalui video virtual sehingga dapat di share ke masyarakat lain.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan), maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan penulis akan mengemukakan saran untuk bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan pihak yang berkepentingan.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu dapat dilihat dari implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan) sebagai berikut :

1. Berdasarkan indikator Komunikasi dengan dua item penilaian yaitu : kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan dan konsistensi perintah yang diberikan kepada pelaksan, berada pada kategori **“Cukup Terimplementasi”**.
2. Berdasarkan indikator Sumber Daya dengan dua item penilaian yaitu : kecukupan staf berupa sumber daya utama dan fasilitas fisik, berada pada kategori **“Cukup Terimplementasi”**

3. Berdasarkan indikator Disposisi dengan dua item penilaian yaitu sikap dari pelaksana program dan jumlah intensif pelaksanaan program, berada pada kategori “**Cukup Terimplementasi**”.
4. Berdasarkan indikator Struktur Birokrasi dengan dua item penilaian yaitu membuat standar operasional prosedur(SOPs) dan melaksanakan tanggungjawab terhadap program, berada pada kategori “**Cukup Terimplementasi**”
5. Berdasarkan observasi dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwasanya Faktor penghambatan selanjutnya kurangnya kemampuan kader PKK pada bidang administrasi dibutuhkan pelatihan-pelatihan, kepala Desa sebagai dewan penyantun harus lebih aktif lagi dalam mengawasi kegiatan PKK, kemudian anggaran dana untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan PKK masih belum dapat memenuhi seluruh kegiatan PKK sehingga tujuan untuk melaksanakan kegiatan pada 10 program PKK.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dari hasil penelitian mengenai implementasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) (Studi Program Kesehatan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan), khususnya dalam pengurusan administrasi kegiatan Pokja (pokok kerja) dalam setiap Program yang ada dan telah sesuai maka penulis menyarankan hasil-hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pada lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk lebih dimaksimalkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program

Kesehatan dimana kegiatan belum seluruhnya dapat dilaksanakan. Selanjutnya seluruh kegiatan dimaksimalkan akan memberikan manfaat dan dampak yang dapat diterima masyarakat.

2. Mengenai pembiayaan ataupun anggaran PKK Seharusnya dana PKK itu banyak sumbernya seperti swadaya masyarakat termasuk didalamnya sumbangan anggota lembaga PKK, bantuan dari anggaran pemerintah Desa, bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah Desa sejumlah 2,2% sekitar (5-15juta/tahun) akan sulit untuk melakukan seluruh kegiatan PKK yang sangat beragam. saran peneliti untuk memafaatkan perusahaan kelapa sawit PT.SERIKAT PUTRA yang ada di Desa Sialang Kayu Batu untuk mendapatkan bantuan dana atau anggaran.
3. Pada indikator komunikasi pemberian informasi kepada masyarakat kurang menyeluruh seperti kegiatan posyandu karena hanya pengumuman dari speaker masjid sehingga ada beberapa kendala informasi tersebut tidak sampai kerumah warga disebabkan jarak rumah dengan masjid yang cukup jauh sehingga diperlukan alternatif lain dalam pemanfaatan teknologi seperti grup khusus masyarakat desa sialang kayu batu ataupun portal web desa harus dapat selalu update dalam pemberian informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Thevesia, Krisnha S, Andinni Prima G.P Nugraha, Totok Mardikanto. (2015). *Pemerintah Berbasis Masyarakat*. Jakarta : Alfabeta
- AgustiNo, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publi, edisi revisi ke-2*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Awang,A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Balkin, I. (2015). *Indeks Pembangunan Desa*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dini,A. (2020). *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jawa Tengah : Literasi Desa Mandiri.
- Drs.Zulkifli, M. d. (2014). *fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan tujuh.
- D.Ibrahim, A. (2011). *Revitalisasi Administrasi Pembangunan*. Bandung: ALFABETA.
- Hasibuan,Melayu S.P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Bumi Aksara
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- kurnia, R. (2019). *Pedoman umum PKK pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga*. cibubur,jawa timur: Bee Media Pustaka.
- Kusumanegara, S. (2009). *Model dan Aktor dalam proses Kebijakan Publik* . yogyakarta: Gava Media.
- Maksudi, Beddy. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok : PT. RajaGrafindo
- Nurcholis,H. (2011). *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga
- Pasolong. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong,Harbani. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Ratih, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rauf&Yusri.M (2015). *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*.Pekanbaru:Zanafa
- Siagian. Sondang P.(1999).*Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Siagian, S. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh : Reinforcement Action and Development.
- syafri Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinagor : Erlangga
- Wahab, P. A. (2014). *Analisis kebijakan*. jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zulkifli.Dkk.(2013). *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru. Fisipol. Uir Press.

Peraturan dan Undang-Undang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah RI Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

Jurnal

- Pebrianti, N. (2018).” Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kelurahan MakromanKecamatan Sambutan Kota Samarinda” *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol 6 (4):119-133.
- Nurazmi, I. (2018) “Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun” *Universitas Medan Area*
- Yuntasari,V. (2019) “Peran Pemberdayan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Petempuan Di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal” *Universitas Negeri Semarang*

Jurnal

Wahyuni, N & Marzaman,A (2019) “Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Telaga” *publik(jurnal ilmu administrasi)*, Vol 8 (2):123-135.

Al’amin, A. (2017) “Penerapan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Tentang Modal Sosial Pada Pelaksanaan Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Keterampilan Program Pkk Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” *jom FISIP*, Vol 4 (2):1-15

